

WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF SEJARAH ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NURMALIA

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
NIM. 511 102 492



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2016 M**

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Sejarah
Dan Kebudayaan Islam

Pada Hari / Tanggal
Kamis / 18 Februari 2016

Darussalam - Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Abdullah Sani, Lc., MA
Nip.196407051996031001

Anton Setia Budi, Spd., M.Sn
Nip.1997206182011011002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Aslam Nur, M.A
Nip.1964012519930331002

Dr. Munawiah, M.Hum
Nip.196806181995032003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Misri A. Muchsin, M.Ag.
NIP. 196303021994031001

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* beserta *Salam* penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tiada terasa waktu begitu cepat berlalu, tanpa meninggalkan jejak yang bisa diikuti, langkah demi langkah telah penulis jalani, walaupun penuh dengan hambatan dan rintangan. Skripsi yang berjudul **Wali Nanggroe dalam Persepektif Sejarah Aceh**, dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam rangka melengkapi beban kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana sekaligus sebagai langkah terakhir menyelesaikan studi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua, yaitu ayahanda saya H.Syarifuddin dan kepada ibunda saya Hj.Nurhayati yang tercinta, yang tidak letih memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a serta memberikan dukungan moral dan material. Ucapan terima kasih tak lupa pula saya ucapkan kepada kakak-kakak yang terkasih, serta semua keluarga dan sahabat, khususnya mahasiswa/i SKI Unit 02 angkatan 2011 yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Ungkapan rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada pembimbing I Bapak Dr. Abdullah Sani Usman Lc. MA. dan Bapak Ajidar Matsyah Lc. MA selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk beserta arahan kepada penulis. Semoga kebaikan mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih penulis kepada bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Prof. Dr. H. Misri A. Muchsin, M.Ag, ketua jurusan SKI Ibu Marduati, MA, penasehat akademik Ibu Ruhamah M.Ag, serta semua dosen program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan tidak lupa pula rasa terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh karyawan dan karyawan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry yang telah memberikan bantuan, serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan mereka.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa banyak sekali mendapat kesulitan dan hambatan, baik dari segi penulisan atau untuk mendapatkan literatur. Oleh karenanya penulis merasakan masih banyak kekurangan yang masih perlu perbaikan, kritik, atau saran yang bersifat membangun agar penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri semoga Allah SWT membalas semua amal dan jasa yang telah mereka berikan kepada penulis. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 7 Januari 2016
Penulis

NURMALIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
LAMPIRAN	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Wali	10
B. Konsep kepemimpinan dalam Sistem Pemerintah Islam	13
C. Konsep Wali Nanggroe Masa Kini	18

BAB III WALI NANGGROE DALAM SEJARAH ACEH

A. Sejarah Wali Nanggroe	23
B. Peran Wali Nanggroe	42
C. Eksistensi Wali Nanggroe Dulu dan Masa Kini	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------	--

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ Wali Nanggroe Dalam Perspektif Sejarah Aceh”. Dalam sejarah Aceh istilah wali nanggroe pertama kali digunakan oleh Tgk Muhammad Daud Beureu-eh ketika mendirikan Negara Islam Aceh dan Republik Islam Aceh. Pemakaian simbol wali negara pada saat itu identik dengan gerakan politik yang berbasis agama Islam untuk mendirikan negara Islam modern pasca sistem kesultanan. Selanjutnya gelar wali nanggroe disandang oleh Hasan Tiro ketika mencetuskan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan mengembalikan kedaulatan Aceh. Wali nanggroe oleh Hasan Tiro adalah suatu bentuk kepemimpinan baru yang berasal dari keluarga di Tiro pasca hilangnya Kerajaan Aceh Darussalam. Perjuangan Hasan Tiro beserta simpatisannya dalam memerdekakan Aceh berlangsung selama kurang lebih 29 tahun yang berakhir dengan sebuah perjanjian damai pada tahun 2005. Dari perjanjian damai tersebut lahirlah sebuah lembaga yang bernama Wali Nanggroe. Wali nanggroe saat ini memiliki fungsi sebagai pemersatu adat, menjaga kemakmuran, keadilan serta kedamaian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Pertama Bagaimana sejarah wali nanggroe dalam sejarah Aceh, Kedua Apa Peran yang dimiliki oleh wali nanggroe, dan yang terakhir Bagaimana eksistensi wali nanggroe dulu dan saat ini. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah Pertama untuk mengetahui sejarah awal mula wali nanggroe dalam sejarah Aceh, Kedua untuk mengetahui peran yang dimiliki wali nanggroe, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui eksistensi wali nanggroe pada masa sekarang. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang langkah-langkahnya terdiri dari pengumpulan data (heuristik), kritik sumber, penafsiran dan historiografi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejarah wali nanggroe dimulai sejak Daud Beureu-eh dan Hasan Tiro. Mengenai keturunan di Tiro yang juga pernah menjabat sebagai wali nanggroe pada masa sultan Kerajaan Aceh Darussalam dipaksa menyerah oleh Belanda, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka pernah menjabat sebagai wali nanggroe, yang ada hanya mereka diberikan mandat dari sultan untuk melanjutkan perang dan bertindak sebagai pemimpin agama dan pemimpin perang. Atas dasar pemberian mandat ini muncul pemikiran dari Hasan Tiro bahwa keluarga di Tiro mulai saat itu bertindak sebagai wali bagi rakyat Aceh. Peran Daud Beureu-eh ketika menjabat sebagai wali nanggroe adalah untuk membawa Aceh menjadi sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai pedoman. Peran wali nanggroe yang dijabat Hasan Tiro adalah untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin tertinggi rakyat Aceh untuk mengembalikan kedaulatan Aceh sebagai sebuah negara yang merdeka. Eksistensinya wali nanggroe pada saat ini adalah sebagai wadah pemersatu adat dan tunduk dibawah pemerintahan RI.

Kata Kunci : *Wali Nanggroe, Sejarah, Eksistensi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah daerah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam Nusantara pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah ibnu Syamsu Syah yang memerintah dari tahun 913-929 H atau 1514-1530 M.¹ Akhir abad ke 15 dan awal abad 16 merupakan masa keemasan kerajaan ini. Pada kurun waktu tersebut Kerajaan Aceh Darussalam bangkit dari evolusi kerajaan kecil menjadi imperium kuat di kawasan Barat Nusantara.² Kerajaan-kerajaan kecil yang dimaksud adalah kerajaan yang ada di daratan Aceh kala itu seperti kerajaan Perlak di Aceh Timur, Samudera Pasai di Aceh Utara, Pedir di Aceh Pidie, Daya di Aceh Barat, Lingga di Aceh Tengah dan Lamuri di Aceh Besar. Kerajaan kerajaan kecil ini adalah penguasa daerah yang ikut memberikan kontribusi bagi perkembangan kerajaan besar Aceh Darussalam selanjutnya. Seperti kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, Islam berkembang di kawasan ini dan menjadi ideologi dalam sistem pemerintahan.

Penyempurnaan atas penyatuan kerajaan Aceh Darussalam dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah yang diproklamkan pada 20 Februari 1511 M atau 21

¹H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: LSKPM,2012), hlm. 532.

²Amirul Hadi, *Aceh Sejarah Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,2010), hlm. 20.

Zulqaidah 916 H.³ Masa kejayaan diperoleh pada masa Sultan Iskandar Muda berkuasa, kerajaan ini berhasil memegang peranan penting dalam berbagai bidang termasuk politik, perdagangan hingga ilmu pengetahuan. Kemegahan yang diperoleh kerajaan Aceh Darussalam menjadikannya sebagai tujuan para pengembara dari berbagai penjuru. Kedatangan mereka bertujuan untuk berdagang, membina hubungan diplomatik hingga menuntut ilmu pun para pengembara datang ke Aceh pada masa itu.

Kerajaan Aceh Darussalam berhasil mencapai masa kejayaan yang sangat gemilang dan tampil sebagai salah satu kerajaan berpengaruh di Nusantara dan mancanegara. Namun dibalik kesuksesan yang dicapai, tak bisa dipungkiri kerajaan Aceh Darussalam juga pernah mengalami masa-masa suram dengan terjadinya konflik perebutan kekuasaan, hingga datangnya bangsa kolonial untuk menjajah. Bangsa kolonial yang pernah singgah dan memunculkan konflik di wilayah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam adalah Portugis, Inggris, Belanda, Amerika Serikat hingga bangsa Asia yaitu Jepang. Tujuan utama para penjajah ini ialah untuk mendapatkan hal yang paling berharga yang dikenal dengan sebutan tiga G, yaitu *Golden* (emas), *Glory* (kejayaan) dan *Gospel* (kristenisasi).

Belanda adalah salah satu bangsa penjajah yang paling berambisi untuk menguasai Kerajaan Aceh Darussalam. Mereka melakukan berbagai cara untuk menguasai daerah ini hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada perang. Deklarasi perang oleh Belanda

³Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh dan Tsunami*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005), hlm. 18.

terhadap Kerajaan Aceh berdaulat pada tanggal 26 Maret 1873 merupakan awal dari sebuah perang yang panjang yang dikenal dengan perang Aceh.⁴

Perang ini menimbulkan banyak kerugian dikedua belah pihak. Walaupun Aceh tak pernah menyerah untuk melawan bangsa *kaphee* (sebutan orang Aceh untuk Belanda). Namun pada abad ke 19 kerajaan ini tidak lagi memiliki pengaruh yang besar. Munculnya kekuatan lokal hingga mereka yang berkhianat dengan bekerjasama dengan pihak lawan. Di sisi lain masih ada pula orang-orang yang setia kepada raja dan tetap membela kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam. Petinggi adat dan ulama adalah golongan yang masih mengakui sultan sebagai simbol tertinggi kerajaan. Pada 29 Januari 1874, setelah kejatuhan istana kerajaan (Dalam) ketangan Belanda, Sultan Mahmud Syah wafat akibat penyakit kolera.⁵ Para petinggi Aceh yang terdiri dari para Para Panglima Sagi mengangkat kerabat sultan yaitu Muhammad Dauh Syah yang masih kanak-kanak menjadi sultan baru. Sultan yang masih kecil dibantu oleh Tuanku Hasyim dalam memimpin kerajaan Aceh pada tahun 1883.⁶ Selanjutnya beberapa orang tokoh diberikan tanggung jawab untuk ikut membantu jalannya pemerintahan yang sedang carut marut kala itu. Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro diangkat menjadi menteri perang, dan Teuku Nyak Umar menjadi Laksamana.

Teungku Chik Muhammad Saman di Tiro merupakan salah satu sosok ulama dan pejuang yang sangat menonjol dalam perang melawan Belanda. Bukan

⁴*Ibid.*, hlm. 192.

⁵ H.M. Said, *Aceh Sepanjang Abad jilid II*, (Medan: Harian Waspada, 2007), hlm.44.

⁶Darwis A Soelaiman ed, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, (Pemerintah Provinsi NAD, 2008), hlm. 203.

hanya dirinya sendiri, anak cucunya serta kerabatnya juga turut serta melawan kaum penjajah. Keturunan Tiro memang sangat terkenal kala itu, mereka dianggap sebagai pemimpin baru yang mampu menyatukan kekuatan rakyat Aceh untuk perang setelah raja dan para petinggi kerajaan dipaksa menyerah oleh Belanda. Mengacu pada pernyataan di atas kepemimpinan keturunan ulama Tiro pada masa itu disebut sebagai awal mula terbentuknya sebuah lembaga yang bernama Wali Nanggroe. Namun ada pula yang menyebutkan istilah wali nanggroe pertama kali ada di Aceh ketika terjadinya pemberontakan setelah kemerdekaan Indonesia untuk mendirikan Negara Bagian Aceh dan Republik Islam Aceh. Istilah ini dipakai oleh pelopor berdirinya negara tersebut yaitu Muhammad Daud Beureu-eh dengan sebutan wali negara.⁷ Istilah wali nanggroe selanjutnya dipakai oleh Hasan Tiro ketika memproklamkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie.⁸

Lembaga Wali Nanggroe belum lama ini telah dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga ini lahir dari perjanjian damai pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Indonesia. Namun mengenai awal mula lembaga ini belum bisa dipastikan asal usulnya. Berdasarkan gambaran tersebut, peneliti bermaksud untuk menelusuri jejak sejarah wali nanggroe dalam sebuah penelitian dengan judul : WALI NANGGROE DALAM PERSPEKTIF SEJARAH ACEH.

⁷Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik; Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 203.

⁸Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 1999), hlm. 143.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka beberapa pertanyaan muncul sebagai pertanyaan penelitian, di antaranya :

1. Bagaimana sejarah munculnya wali nanggroe dalam sejarah Aceh ?
2. Siapa saja yang pernah menduduki jabatan wali nanggroe ?
3. Bagaimana eksistensi wali nanggroe masa kini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejarah munculnya wali nanggroe dalam sejarah Aceh
2. Untuk mengetahui tokoh yang pernah menduduki jabatan wali nanggroe
3. Untuk mengetahui eksistensi wali nanggroe masa kini

Disisi lain penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

a. Manfaat akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan telaah bagi para akademisi dan intelektual khususnya jurusan sejarah.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga terkait, termasuk para elit politik serta pemerintah Aceh secara umum. Di sisi lain penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam merancang kebijakan bagi rakyat Aceh yang tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok, mampu

membagi tugas dan fungsinya secara professional, proporsional serta tidak mengaburkan fakta sejarah yang ada. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai sejarah Aceh serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami karya tulis ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terlebih dulu mengenai judul yang diangkat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca dan memberikan gambaran serta maksud penulis dalam karya tulis ini. Berikut beberapa pengertian istilah dari judul yang diangkat :

1. Wali Nanggroe

Wali nanggroe (negara) adalah jabatan politik, penguasa tertinggi dalam suatu negara (kepala pemerintahan), setara dengan khalifah, sultan, ulil amri, raja ataupun kaisar.⁹

2. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif berarti sudut pandang atau pandangan.¹⁰ Perspektif dalam tulisan ini adalah sudut pandang atau pendapat suatu permasalahan yang dilihat dari bahan-bahan sejarah baik

⁹Baihaqi, "Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, Januari 2014, hlm. 10.

¹⁰[Http://Kbbi.Web.Id/Perspektif](http://Kbbi.Web.Id/Perspektif), diakses 16 Maret 2015

dari sumber tulisan maupun sumber lisan yang berasal dari pendapat para sejarawan untuk melihat awal munculnya wali nanggroe.

3. Sejarah

Sejarah adalah ilmu yang berusaha menemukan, mengungkapkan, serta memahami nilai dan makna budaya yang terkandung dalam peristiwa masa lampau.¹¹ Sejarah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah asal usul peristiwa masa lampau mengenai munculnya wali nanggroe.

4. Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi yang terletak diujung pulau Sumatera berdiri pada tanggal 7 Desember 1956.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan penyelidikan yang seksama dan teliti mengenai suatu permasalahan. Oleh karena itu dalam penelitian ini juga menggunakan suatu metode yang dijadikan sebagai landasan penulisan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah atau metode historis, yang bertumpu pada empat langkah :¹²

1. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pada tahap ini sumber yang berhasil dikumpulkan adalah sumber sekunder dan sumber primer. Sumber ini diperoleh melalui buku-buku bacaan yang

¹¹Dudung Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 14.

¹²*Ibid.*, hlm. 63.

terdapat di berbagai perpustakaan di wilayah Banda Aceh. Buku yang dijadikan sumber antara lain ,Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi oleh Amirul Hadi, Aceh Sepanjang Abad oleh H. Muhammad Said, Tarich Aceh dan Nusantara oleh H.M Zainuddin serta bacaan lainnya yang diperoleh dari majalah, koran maupun internet. Perpustakaan yang dikunjungi adalah Pustaka wilayah, Pustaka UIN Ar-Raniry, Pustaka Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, dan Pustaka BPNB, serta PDIA. Sumber lainnya diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa para ahli dalam bidang sejarah. Pada tahap pengumpulan sumber, peneliti menemukan sedikit kesulitan dalam menemukan bahan seperti yang dibutuhkan. Sumber yang didapat masih sangat terbatas, selain itu tidak semua narasumber berkenan untuk diwawancarai.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber ini berfungsi untuk mencari kebenaran dari data yang telah diperoleh. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah memverifikasi dan mencari keabsahan antar sumber yang ada.

3. Penafsiran (Intepretasi)

Intepretasi adalah usaha untuk menguraikan sumber yang telah melalui tahapan kritik sumber. Pada tahapan ini peneliti berusaha untuk mencari dan memahami serta menggali makna yang tersirat pada sumber yang telah diperoleh. Tahapan ini diperlukan untuk melahirkan sebuah fakta yang relevan dan mendekati objektivitas.

4. Historiografi

Tahapan terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah historiografi. Historiografi adalah kegiatan menulis, memaparkan dan pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Pada tahapan ini peneliti berusaha memaparkan dan menjelaskan hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penting diuraikan untuk memberikan arahan serta gambaran bagi pembaca dalam memahami karya tulis ini. Adapun pembahasannya dibagi kedalam empat bab, berikut sistematika penulisan secara lengkap :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang memiliki sub-bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, serta yang terakhir dari bab satu ini yaitu, sistematika penulisan untuk mengetahui sekilas isi pembahasan dari tiap-tiap bab.

Bab dua, peneliti menulis mengenai landasan teori yang memiliki sub-bab yaitu : pengertian wali, konsep kepemimpinan dalam sistem pemerintah Islam, dan yang terakhir konsep wali nanggroe sekarang.

Bab tiga merupakan bagian inti dari hasil penelitian mengenai wali nanggroe dalam perspektif sejarah Aceh, lalu sub-bab berikutnya berisi tentang peran wali nanggroe, selanjutnya eksistensi wali nanggroe masa kini.

Bab empat adalah bab terakhir dalam tulisan ini, dalam bab ini menjelaskan atau meringkas kembali mengenai hasil penelitian tulisan ini. Adapun sub-babnya terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Wali

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali memiliki beberapa pengertian yaitu, orang yang menurut hukum memiliki kewajiban mengurus anak yatim, orang yang menjadi penjamin dan pengasuh anak, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, orang shaleh penyebar agama, dan kepala pemerintahan. Menurut bahasa wali berarti cinta, sahabat karib, penolong, pembantu, penjaga, pelindung, pengurus, juga berarti keluarga dekat, bentuk jama' dari wali adalah aulia yang artinya kekasih Allah.¹

Para alim ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian kata wali. Menurut Ibnu Arabi wali jama'nya awliya berasal dari kata waw, lam, ya, yang mempunyai makna kedekatan, yaitu pertama berarti seorang teman, dan yang kedua berarti mengarahkan, mengatur, mewakili.² Dalam dunia sufi istilah wali mengacu pada dua pengertian, pertama orang yang ketaatannya kepada Allah berlangsung secara terus menerus, kedua seseorang yang dipelihara dan dijaga oleh Allah secara terus menerus dari berbagai perbuatan maksiat serta mendapat taufik untuk tetap dalam ketaatan.³ Selain itu terdapat pengertian lain

¹Labib Mz, *Perbedaan Wali Allah dengan Wali Syaitan*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2004), hlm. 74.

²Harapandi Dahri, *Wali dan Keramat dalam Islam*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hlm. 131.

³*Ibid.*, hlm. 130.

dari wali, yaitu wali yang berarti pemimpin dalam Al-Quran Surat Annisaa ayat 144.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا مُبِينًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?”

Wali dalam ayat ini berarti pemimpin, Allah melarang umat Islam untuk mengangkat orang kafir maupun munafik sebagai pemimpin. Hal ini dikarenakan pengangkatan tersebut dapat memicu kemurkaan Allah dengan didatangkannya siksaan yang perih. Dalam Al-Quran secara implisit mengandung etika dalam mengangkat pemimpin, yaitu memegang teguh prinsip amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran dan Hadits, musyawarah, jujur tidak khianat, berkarya nyata dan kreatif, serta tidak mengangkat kecuali orang beriman.⁴

Dalam Islam terdapat pula istilah Waliyul Amri yang terdiri dari dua kosakata Arab. Wali berarti orang yang ditangannya terletak tanggung jawab atau wewenang, dan al-‘amr yang berarti urusan atau perkara.⁵ Secara keseluruhan Waliyul Amri berarti orang yang mempunyai tanggung jawab atau kekuasaan

⁴Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm 217.

⁵IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia Jilid 3*, (Jakarta; Djambatan, 1992), hlm. 1261.

terhadap suatu urusan penting. Ada sebagian ulama memandang waliyul amri sama dengan ulil amri yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Mengenai penafsiran arti ulil amri dikalangan ahli tafsi mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Seperti Imam at-Tabari mengartikan ulil amri adalah raja yang bertindak sebagai kepala pemerintahan, Ibnu al-Arabi menafsirkan ulil amri sebagai raja dan ulama, al-Badawi mengartikannya sebagai khalifah beserta para qadhi dan panglima militer. Dilihat dari artinya wali merupakan sebutan kepada seseorang yang dipercaya serta diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu tuntutan di muka bumi.

B. Konsep Kepemimpinan dalam Sistem Pemerintahan Islam

Konsep wali (pemimpin) dalam sistem pemerintahan Islam telah diatur dalam Al-Quran secara tersirat. Pada masa kepemimpinan nabi Muhammad SAW persoalan kepemimpinan secara Islam telah diajarkan walaupun tidak secara mendalam mengenai tata cara pelaksanaannya. Selanjutnya masa Khulafaur Rasyidin sistem politik mulai diatur secara perlahan namun pasti, selanjutnya masa dinasti-dinasti besar dalam Islam, lahirnya kerajaan-kerajaan Islam diseluruh

belahan dunia konsep sistem kepemimpinan Islam secara terus-menerus mengalami pembenahan. Salah satu karya besar mengenai konsep kepemimpinan dalam sistem politik Islam adalah *Ahkam Sulthaniyah* karya al-Mawardi.

Menurut teori yang dikemukakan Al-Mawardi seorang pemimpin harus memenuhi 7 kriteria yang meliputi keseimbangan dalam memiliki sifat teladan sebagaimana mestinya serta taat beragama dan mendahulukan kepentingan umat, mempunyai ilmu pengetahuan yang mampu membuat kebijakan terhadap berbagai persoalan, lengkap dan sehat fungsi panca inderanya, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya untuk bergerak dan bertindak, memiliki visi yang baik untuk menciptakan kemaslahatan umat, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat dari berbagai macam kemungkinan, mempunyai nasab dari suku Quraisy. Dari keseluruhan kriteria yang dikemukakan Al-Mawardi, kriteria terakhir yaitu harus berasal dari suku Quraisy sejak berakhirnya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan dimulainya kekuasaan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, kategori ini lenyap seiring dengan kebijakan penguasa masa itu.⁶

Pandangan lainnya dari Al-Mawardi yang tak kalah penting adalah persoalan mengenai pemilihan dan pengangkatan kepala negara dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan cara pemilihan oleh *Ahlul Halli wal Aqdi*, dan yang kedua dengan cara pemberian atau penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya. Cara kedua ini calon pengganti atau putra mahkota dikenal dengan istilah *Wali al 'Ahd*. Seorang khalifah dapat saja menunjuk anaknya menjadi

⁶Lihat di <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=10896> diakses pada 4 Juli 2015.

khalifah asal sang anak memenuhi syarat sebagai seorang khalifah, serta pengangkatannya disetujui oleh sebagian besar *Ahlul Halli wa Aqdi*. Selain itu seseorang yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan khalifah juga dapat ditunjuk menjadi pengganti asalkan memenuhi syarat dan disetujui oleh *Ahlul Halli wa Aqdi*.

Ahlul Halli wal Aqdi yaitu orang-orang yang dipilih oleh kepala negara yang diberikan wewenang untuk melantik maupun menurunkan seorang pemimpin dari tahta. Dalam istilah politik mereka disebut dewan perwakilan (lembaga legislatif), yaitu orang-orang yang menampung dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam hal memilih pemimpin maupun hal lainnya. Terdapat tiga kriteria untuk bisa menjadi anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* , yaitu :⁷

1. Mempunyai kredibilitas dan keseimbangan yang memenuhi kriteria, yakni kepercayaan rakyat terhadap dirinya bahwa ia benar-benar memiliki sifat-sifat teladan dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3. Mempunyai pendapat kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk diberi amanat memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemashlahatan umat.

⁷Lihat di <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=10896> diakses pada 4 Juli 2015.

Ahlul Halli wal Aqdi didasarkan pada sistem pemilihan era Khulafaur Rasyidin yang dilaksanakan oleh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu kaum Anshar dan Muhajirin, inilah latarbelakang penerapan sistem pemilihan berdasarkan *Ahlul Halli wa Aqdi* yang disepakati oleh sebagian ulama fiqih.⁸ *Ahlul Halli wa Aqdi* dalam membuat keputusan maupun kebijakan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits, karena kekuasaan *Ahlul Halli wa Aqdi* berada di bawah dan di dalam kekuasaan Allah. Berikut fungsi *Ahlul Halli wa Aqdi* :⁹

1. *Ahlul Halli wa Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat khalifah.
2. *Ahlul Halli wa Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang mashlahat.
3. *Ahlul Halli wa Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadits.
4. *Ahlul Halli wa Aqdi* adalah tempat konsultasi khalifah dan menentukan kebijakan.
5. *Ahlul Halli wa Aqdi* bertugas mengawasi jalannya pemerintahan.

Ahkam Sulthaniyah adalah kitab karya Al-Mawardi dalam bidang politik yang berisi tentang berbagai persoalan politik dan tata negara dalam bingkai

⁸Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 127.

⁹Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 118.

Islam. Kitab ini membuat Al-Mawardi terkenal sebagai bapak politik baik dalam dunia politik maupun akademik. Secara garis besar berikut sketsa teori al-Mawardi mengenai sistem pemerintahan :¹⁰

1. Landasan konstitusional, lembaga kekhalifahan dianggap sebagai suatu tuntutan syari'ah, bukan kehendak akal manusia.
2. Proses konstitusi :
 - a. Lembaga kekhalifahan diatur dengan cara pemilihan, dipilih oleh dewan pemilihan dengan syarat jujur, luas, pengetahuan dan adil.
 - b. Hak mengajukan pendapat tidak hanya dinikmati oleh penduduk ibukota, tetapi karena alasan praktis, secara tradisional khalifah dipilih di ibukota.
 - c. Dibenarkan memilih calon yang kurang memenuhi syarat, meski ada calon lain yang memenuhinya.
 - d. Seorang khalifah dapat dipilih dan dilantik oleh khalifah yang sedang berkuasa, calon pengganti dikenal dengan sebutan *Wali al-Ahdi*.
 - e. Sekali dipilih dan dilantik maka khalifah telah mengikat diri dengan umat melalui perjanjian yang menjamin kesetiaan dalam memenuhi segenap tugas dan menerima janji setia kepatuhan secara timbal balik.
 - f. Masa jabatan tidak ada ketentuan pasti mengenai berapa lama masa jabatan. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan habisnya masa jabatan yaitu, meninggal, diberhentikan karena alasan tertentu seperti reputasinya rusak, menuruti syahwatya, melakukan perbuatan syubhat, terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuh, kekurangan dalam

¹⁰Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj Abdul Hayyit al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 18.

melakukan tindakan baik karena jabatan fungsionalnya dikuasai oleh pembantunya, maupun karena ditawan; jika ditawan kaum musyrikin maka status kepemimpinannya gugur walaupun ia memberi mandat tapi mandatnya tidak sah kecuali jika masih ada harapan untuk ia dibebaskan baru mandatnya sah, jika ditawan oleh kaum muslimin ia tetap sah sebagai pemimpin, namun jika ia gugur dalam masa tawanan jabatannya ikut gugur dan pengganti yang ditunjuk oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* tidak sah sebagai pengganti raja.

Konsep sistem pemerintahan yang dikemukakan al-Mawardi banyak dijadikan acuan oleh pemimpin islam masa itu. Teori al-Mawardi ini dipengaruhi oleh konsep kepemimpinan masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin serta dinasti-dinasti awal Islam pasca wafatnya Sahabat nabi yang empat.

C. Konsep Kepemimpinan dalam Sejarah Pemerintahan Kerajaan Aceh

Di Aceh kata wali memiliki arti tersendiri baik dalam bidang politik maupun arti pada bidang agama. Secara agama, istilah wali sama maknanya dengan pengertian wali yang dibahas sebelumnya, yaitu wali sebagai gelar yang diberikan kepada tokoh pemuka agama yang sudah sangat tinggi tingkat keimanannya yang dikenal dengan sebutan Auliya. Selanjutnya wali sebagai bagian dari keluarga, kepala keluarga maupun wali dalam pernikahan. Ada pula wali sebagai pemimpin dalam hal sistem pemerintahan. Wali nanggroe (negara)

adalah jabatan politik, penguasa tertinggi dalam suatu negara (kepala pemerintahan), setara dengan khalifah, sultan, ulil amri, raja ataupun kaisar.¹¹

Dimulai dari raja-raja Islam Aceh kerajaan Perlak hingga Aceh Darussalam dalam pemerintahannya telah menempatkan Islam sebagai dasar negara. Ulama mendapat tempat yang istimewa dalam pemerintahan kerajaan Aceh kala itu. Oleh sebab itu tak heran banyak ulama dari dalam maupun luar Aceh yang pernah menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan Kerajaan Aceh Darussalam.

Bentuk pemerintahan kerajaan Aceh banyak mengikuti kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Pemakaian kata sultan untuk panggilan kepada raja yang berasal dari kata kerja *salata* yang artinya memimpin atau menguasai, yang awalnya dipakai oleh penguasa Muslim sejak abad ke 11 M.¹² Sistem kesultanan lahir dari asimilasi antara norma Islam dengan tradisi politik kerajaan setempat yang berkembang sejak kesultanan Ottoman, yang kemudian menjadi model sistem politik kerajaan Islam di kawasan Asia Tenggara.¹³ Selain sultan ada pula sebutan wali raja yaitu beberapa petinggi kerajaan yang memangku jabatan sultan belum baligh.

Anthony Reid dalam bukunya yang berjudul *Asal Mula Konflik Aceh* menyebutkan Wali Raja yaitu jabatan sebagai pemangku raja atau mangkubumi :

¹¹Baihaqi, "Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, Januari 2014, hlm. 10.

¹²Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, (Yogyakarta: Ak Group dan Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 39.

¹³Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 199.

“Dipihak lain Abd Rahman tidak pernah berbaikan kembali dengan Tuanku Hasyim yang khawatir pada ambisi Abd Rahman untuk menggantikannya sebagai wali raja.”¹⁴

Dalam buku *Aceh Sepanjang Abad* karya H.Muhammad Said juga disinggung mengenai wali yang artinya juga sebagai pemangku raja atau mangkubumi:

“ Para petinggi kerajaan memilih Tuanku Muhammad Daud Syah yang berusia 9 tahun, cucu almarhum Sultan Mansyur Syah, telah dipilih menjadi sultan dengan dipangku oleh 4 orang wali.”¹⁵

H.M Zainuddin dalam bukunya *Tarich Aceh dan Nusantara* beberapa kali menyebut istilah wali, yang artinya jabatan yang diberikan untuk memimpin daerah taklukan :

“Pada permulaan abad XVI kira-kira tahun 1509 M, orang Portugis datang ke tanah Aceh dan Raja Ali Mughayat Syah serta adiknya Raja Ibrahim yang pada waktu menjadi wali negara Pidie.”¹⁶Namun istilah wali yang disebutkan oleh H.M Zainuddin tidak ditemukan dalam sumber lainnya, sehingga pendapat ini dinilai kurang bisa dijadikan acuan untuk melihat asal mula penggunaan istilah wali.

Terdapat beberapa pengertian wali yang digunakan dalam sistem pemerintahan di Aceh, baik itu masa kerajaan maupun setelah kerajaan tidak ada

¹⁴Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, terj Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2005),hlm. 198.

¹⁵H. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, (Medan: Harian Waspada Medan, 2007),hlm.48.

¹⁶H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, cet 2 (Banda Aceh: LKPSM Aceh: 2012), hlm. 339.

lagi. Istilah wali yang pernah digunakan adalah wali raja, wali negara, dan wali nangroe. Wali raja yaitu jabatan yang mengurus jalannya pemerintahan dalam hal ini ia sebagai pembantu sultan dikarenakan keadaan sultan yang tidak memungkinkan namun biasanya keadaan sultan yang belum baligh. Setelah sultan baligh dan dianggap mampu, wali raja langsung menyerahkan pemerintahan ketangan raja. Wali raja menjalankan tugasnya sebagai tangan kanan sultan juga dibantu oleh para petinggi kerajaan lainnya untuk memutuskan berbagai perkara dalam pemerintahan.

Wali raja pernah diberlakukan ketika sultan Firman Syah dinobatkan pada usia 1 tahun, kepemimpinan dibantu oleh orang besar dari kerajaan setelah dewasa baru memegang kekuasaan sendiri. Selanjutnya pada tahun 1575-1576 M sultan Muda ibnu sultan Ali Riayat Syah, hanya namanya saja sultan yang memerintah juga para wali raja yaitu orang-orang besar dan para alim ulama.¹⁷ Lalu pada tahun 1802-1830 M sultan Ala Addin Jauhar Alam Syah ia diangkat pada usia yang masih kanak-kanak, pemerintahannya dipangku oleh sang paman yang bernama Tuanku Cut Zainal Abidin.¹⁸

Wali raja juga pernah terjadi pada saat sultan Mahmud Syah mangkat, ia digantikan oleh putranya yang masih belia sultan Ali Iskandar Syah. Pelaku pemerintahan sehari-hari dipegang oleh wali raja, yaitu Tuanku Ibrahim yang didampingi oleh Tuanku Raja Muda dan Tuanku Abbas. Selanjutnya wali raja berulang kembali pada saat sultan Muhammad Daud Syah naik tahta pada usianya

¹⁷H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, (Banda Aceh: LSKPM, 2012), hlm.530.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 539.

yang juga masih belia. Pemerintahan dibantu oleh Tuanku Hasyim, dan para Panglima Sagi.¹⁹

Tuanku Hasyim sebelumnya pernah dipercayai menjadi wakil kerajaan Aceh Darussalam di beberapa daerah. Ia memegang peranan yang penting baik pada saat ia menjabat sebagai wali raja maupun sesudah raja mengambil alih kekuasaan. Ia merupakan keluarga sultan Alaidin Ibrahim Mansyur Syah, yang lahir pada tahun 1840.²⁰ Tuanku Hasyim dinilai sebagai panglima yang ulung penuh semangat dan sangat baik dalam hal memimpin pasukan. Belanda juga sangat segan terhadap Tuanku Hasyim, mereka berusaha merangkul Tuanku Hasyim agar dapat memadamkan perang yang terus berkecamuk. Namun hal itu tidak sedikitpun mampu membuat Tuanku Hasyim tergoda akan bujuk rayu bangsa Belanda.²¹

Selanjutnya muncul gelar wali negara ketika Muhammad Daud Beureu-eh mendirikan Negara Republik Islam Aceh. Muhammad Daud Beureu-eh mendidik umat untuk memerangi penjajahan Belanda dan menghancurkan kezaliman di bumi Aceh. Pada tanggal 5 Mei 1939 bersama dengan ulama pembaharu lainnya mendirikan PUSA yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh di Kompleks Pendidikan Al-Muslim Matang Glumpang Dua. Dalam Organisasi tersebut ia terpilih sebagai ketua satu.

¹⁹Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm 195.

²⁰Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, (Jakarta: PT Cita Panca Serangkai, 1993), hlm 37.

²¹Muchtaruddin Ibrahim, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Tuanku Hasyim Bangta Muda Panglima Tertinggi Angkatan Perang Aceh*, (Jakarta: Departemen P dan K, 1977), hlm. 47.

Wali negara lalu digunakan kembali oleh Hasan di Tiro ketika menjadi pemimpin Gerakan Aceh Merdeka, ia mengubahnya menjadi wali nanggroe. Dari gambaran tersebut, sebutan wali dalam sistem pemerintahan di Aceh dapat dikatakan sudah digunakan sejak masa kerajaan. Walaupun terdapat perbedaan makna dan tujuan tergantung pada tokoh yang menggunakannya. Istilah wali yang pernah ada yaitu wali negara atau wali nanggroe. Konsep wali dalam sistem pemerintahan Aceh pada masa kerajaan maupun setelah runtuhnya kerajaan Aceh Darussalam adalah jabatan sebagai pemimpin, berbeda dengan wali nanggroe yang ada pada saat ini yaitu berfungsi sebagai pemersatu adat.²²

²² Keurukon Katibul Wali, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm.5.

BAB III

WALI NANGGROE SEPANJANG SEJARAH ACEH

A. Wali Nanggroe Sepanjang Sejarah

Wali dalam sistem pemerintahan Aceh telah dikenal sejak masa kerajaan berlanjut hingga saat ini. Istilah wali yang digunakan adalah wali raja, wali negara dan wali nanggroe. Wali raja memiliki makna sebagai pemangku raja, wali negara memiliki makna sebagai pemimpin negara Aceh yang berlatar belakang keislaman, yang terakhir wali nanggroe yang memiliki makna sebagai penyambung kepemimpinan pasca hilangnya kerajaan di Aceh. Sebutan wali negara dianggap sama dengan wali nanggroe walaupun terdapat perbedaan dalam hal maksud dan tujuannya.

Pemakaian simbol wali negara pada saat itu identik dengan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam modern pasca sistem kesultanan, serta evolusi dari sistem politik kesultanan yang lebih dulu memakai sebutan wali raja.¹ Istilah wali negara digunakan ketika Tgk Muhammad Daud Beureu-eh mendirikan Negara Republik Islam Aceh. Ia menggunakan gelar wali negara selaku bertindak sebagai pemimpin pada saat itu. Muhammad Daud Beureu-eh lahir pada tanggal 23 September 1896 di gampong Beureu-eh Meunasah Dayah Kecamatan Mutiara

¹Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 201.

Kabupaten Pidie Aceh.²Ia adalah ulama kharismatik yang berusaha mengembalikan daerah Aceh yang berdaulat pada tahun 1953.

Muhammad Daud mendidik umat untuk memerangai penjajahan Belanda dan menghancurkan kezaliman di bumi Aceh. Pada tanggal 5 Mei 1939 bersama dengan ulama pembaharu lainnya mendirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di Kompleks Pendidikan Al-Muslim Matang Glumpang Dua, ia terpilih menjadi ketua satu dalam organisasi tersebut.³ Selanjutnya karena kegigihannya, ia diangkat menjadi gubernur untuk wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.

Pada masa itu ia menjadi sosok pemimpin dan ulama besar yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Aceh. Tahun 1947 Daud Beureu-eh menerima janji dari presiden Soekarno, jika Indonesia merdeka Aceh akan diberikan keistimewaan khusus sebagai sebuah daerah. Atas janji inilah Daud Beureu-eh menggerakkan seluruh rakyat Aceh yang memiliki daya juang yang tinggi untuk membebaskan Indonesia dari serbuan Belanda. Dengan perjuangan dan semangat jihad terutama sekali rakyat Aceh berhasil mempertahankan benteng Medan Area dari Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Ditambah lagi peran Radio Rimba Raya yang menginformasikan kepada dunia luar bahwa Indonesia masih merdeka dan tidak sanggup direbut lagi oleh Belanda.

Daud Beureu-eh pada akhirnya harus menerima kenyataan pahit, karena Soekarno tidak menepati janji sebagaimana mestinya. Puncaknya pada 21 September 1953 Daud Beureu-eh bersama dengan pengikutnya membuat

²Hasanuddin Yusuf Adan, *Teuku Muhammad Daud Beureu-eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher,2007), hlm. 1.

³*Ibid.*, hlm. 4.

pernyataan memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia. Sehari setelah proklamasi di Titeue, Daud Beureu-eh menguasai sebagian besar Pidie dan menempatkan markasnya di Garot yang menandai dimulainya konflik selama empat tahun. Dari sinilah Daud Beureu-eh menggunakan istilah wali negara sebagaimana tercantum dalam maklumat-maklumat politiknya.

Demikian pula pada saat ia memproklamirkan Republik Islam Aceh (RIA) pada 1961 tetap menggunakan sebutan wali negara dalam setiap surat dan pernyataan politik yang dikeluarkannya sebagai pemimpin politik tertinggi. Perjuangan panjang Daud Beureu-eh untuk mendirikan negara Islam berakhir pada 9 Mei 1962 dengan berdamainya pihak Daud Beureu-eh dengan Republik Indonesia.⁴ Perjuangan Daud Beureu-eh dianggap perang rakyat Aceh melawan pemerintah Indonesia, karena rakyat Aceh dari seluruh lapisan masyarakat ikut serta baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Istilah wali negara yang disandang oleh Daud Beureu-eh memiliki latar belakang keislaman, yaitu berubahnya sistem politik era kesultanan menjadi politik republik Islam maka istilah wali raja berubah menjadi wali negara.⁵ Pada saat itu Daud Beureu-eh ikut serta dengan gerakan Negara Islam Indonesia oleh SM Kartosoewirjo yang ada di Jawa yang juga memakai istilah wali negara untuk pemimpin pemerintahan. Wali negara yang dimaksud oleh Daud Beureu-eh

⁴Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm. 155.

⁵Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hlm. 203.

merujuk kepada identitas Negara Islam yang ingin ia wujudkan. Ia diangkat sebagai wali negara oleh sebagian besar rakyat Aceh yang menjadi pendukung setia gerakan yang ia cetuskan. Hal ini tercantum dalam Piagam Bate Kareung, yaitu sebagai berikut :⁶

1. Wali negara adalah gelar dari Kepala Negara Bahagian dan merupakan Kepala Eksekutif Negara.
2. Wali negara dipilih oleh rakyat Negara Bahagian.
3. Pada saat lahirnya Piagam ini, wali negara yang pertama adalah Tgk Muhammad Daud Beureu-eh.

Wali negara yang disandang oleh Tgk Daud Beureu-eh adalah untuk gelar pemimpin Negara tertinggi yang ingin menjadikan Aceh sebagai Negara Islam. Setelah memakai gelar wali nanggroe Daud Beureu-eh mencantumkan gelar tersebut dalam berbagai surat resminya.

Istilah wali muncul kembali pada saat Hasan Tiro mendirikan sebuah gerakan pemberontakan yang dimaksud untuk memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia. Gelar wali nanggroe digunakan oleh M. Hasan Di Tiro ketika memproklamkan Negara Islam Aceh pada 24 Mei 1977 di Gunung Halimon Aceh Pidie. Muhammad Hasan di Tiro yang lahir sekitar tahun 1925 dan merupakan keturunan seorang ulama sekaligus pemimpin perlawanan terkenal dalam melawan Belanda yaitu Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman.⁷

⁶Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh : Bandar Publishing, 2012), hlm. 214.

Pada awal November 1945 Hasan di Tiro bersama abangnya Tgk Zainal Abidin di Tiro sudah ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia melalui posisinya sebagai pengurus PRI (Pemuda Republik Indonesia) Lameulo.⁸ Ketika Daud Beureu-e mendirikan Darul Islam kedua saudara di Tiro ini pun ikut serta dalam gerakan tersebut. Hasan Tiro dan Abangnya Tgk Zainal Abidin di Tiro aktif dalam kegiatan politik.

Hasan Tiro yang pada awalnya ikut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, namun pada akhirnya memberontak yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Gerakan Negara Islam Aceh yang juga dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) muncul karena berbagai penyebab antara lain kekecewaan terhadap posisi Aceh dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Berawal dari era 1970 Soeharto mulai menunjukkan sikap tamaknya untuk mengambil sumber daya alam Aceh melalui rencana proyek-proyek multinasional.⁹

Selain itu Hasan Tiro berpendapat bahwa Pancasila bukan filsafat, suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia, Islamlah yang dijadikan filsafat atau ideologi negara karena Islam hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Ia juga menolak bentuk ketatanegaraan Republik Indonesia yang bersifat unitaris, karena bentuk seperti itu akan menimbulkan dominasi suku.¹⁰ Menurut Hasan Tiro

⁷M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 11.

⁸*Ibid.*, hlm 12.

⁹Neta S Pane, *Gerakan Aceh Merdeka : Solusi, Harapan, dan Impian*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 30.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 14.

gerakan yang ia dan pengikutnya cetuskan bukan sebuah gerakan pemberontakan, tapi gerakan pembebasan yaitu membebaskan diri dari jajahan bangsa Jawa.

Setelah memproklamkan negara bentukannya, ia pun mengumumkan struktur pemerintahan dengan posisi tertinggi bergelar wali negara (nanggrou, nanggroe) dan dipegang langsung olehnya serta dibantu oleh pengikutnya yang mengisi posisi sebagai menteri. Kabinet Negara Aceh Sumatera baru dapat melaksanakan sidang pertama pada 15 Agustus 1977, sedangkan upacara pelantikan dan penyempahan dilaksanakan pada 30 Oktober 1977 di Camp Lhok Nilam pedalaman Tiro.¹¹ Hal ini terjadi gerak mereka yang masih sangat terbatas dan mulai tercium oleh aparat keamanan.

Mengenai gelar wali nanggroe yang disandang oleh Hasan Tiro, ia berpendapat bahwa karena hubungan darah dan alasan sejarah dengan “endatunya” Tgk Chik Muhammad Saman yang hampir semua keturunan lelaki dibasmi oleh Belanda, Tgk Ma’at Amin bin Tgk Muhammad Amin di Tiro yang baru berumur 16 tahun juga dibunuh Belanda karena beliau telah menjadi pemimpin Aceh.

Keturunan di Tiro dianggap sebagai pemimpin rakyat Aceh saat berperang melawan Belanda.¹²Perang Aceh dengan Belanda telah berjalan selama 30 tahun dari tahun 1873-1903 yaitu masa perjuangan Sultan Aceh, T.Panglima Polem, T.Loengbata dan disusul masa perjuangan Tgk Chik Di-Tiro dan masa Teuku

¹¹*Ibid.*, hlm. 28.

¹²Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing,2013), hlm. xvii.

Umar Johan Pahlawan, Cut Nyak dien serta pahlwan-pahlawan lainnya.¹³ Sultan Daud Syah merupakan sultan terakhir kerajaan Aceh Darussalam yang ikut berperang melawan Belanda.

Ketika itu keadaan pemerintahan kerajaan Aceh Darussalam berada dalam situasi genting akibat serangan Belanda. Sultan yang harus terus menghindar dari kejaran Belanda agar tetap bisa menjaga kedaulatan negerinya. Pada saat Belanda melancarkan aksinya secara terus menerus sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke Keumala, seluruh anggota parlemen yang terdiri dari Tuanku Raja Keumala, Tuanku Banta Hasyem dan Tgk Panglima Polem serta Tgk Chik di Tanoh Abe Syeh Abdul Wahab menyerahkan kekuasaan kerajaan Aceh kepada Tgk Chik di Tiro pada tanggal 28 Januari 1874 sebagai penanggung jawab dan berkuasa penuh dalam Negara Aceh.¹⁴

Sejak saat itu Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman menjabat sebagai wali negara Aceh dengan panggilan “Mukarram Maulana al Mudabbir al Malik”Teungku Tjhik di Tiro, gelar tersebut termaktub dalam sarakata wali nangroe yang dicantumkan oleh Hasan Tiro dalam tulisannya.¹⁵Tgk Chik di Tiro sendiri adalah anak dari Tgk Sidri keturunan Bugis yang menjadi wali hakim di sekitar wilayah Mesjid Raya Pidie menggantikan ayah mertuanya Tgk Pakeh Klibut. Tgk Tjhik di Tiro menikah dengan anak Teungku Ubet di Tiro Cumbok

¹³Anas M.Yunus, *Gerak Kebangkitan Aceh Kumpulan Karya sejarah M Yunus Djamil*, (Bandung: Bina Biladi Press, 2009),hlm.395.

¹⁴Munawar A Djalil, *Hasan Tiro Berontak Antara Alasan Historis, Yuridis dan Realitas Sosial*,(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009), hlm 60.

¹⁵Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing,2013), hlm. 45.

dan memperoleh tiga orang putera yaitu, Tgk Mat Amin, Tgk Maid, dan Tgk Beb.¹⁶

Tiro adalah salah satu IX mukim Keumangan, distrik Pidie disana terdapat sebuah dayah yang paling ternama dipimpin oleh seorang ulama yang bergelar Tgk Chik. Sheikh Saman, yang secara resmi menggunakan gelar Tgk Chik pada tahun 1885, walaupun sebelumnya ia telah dikenal luas sebagai Tgk di Tiro.¹⁷ Tgk Chik di Tiro menyusun kekuatan untuk perang gerilya dan terkenal sebagai pemersatu gerakan rakyat dalam melawan Belanda dengan semboyan Perang Sabil.

Hikayat Prang Sabi yang ditulisnya berhasil menghipnotis banyak rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Tgk Chik di Tiro berkeliling Aceh untuk mengkampanyekan perang jihad serta berhasil mengumpulkan sejumlah dana untuk mendanai perang. Tgk Chik di Tiro merupakan sosok ulama besar kala itu yang bukan hanya paham mengenai masalah agama namun juga dikenal sebagai sosok pemimpin perang yang handal. Namun disaat yang tidak diduga, Tgk Chik di Tiro wafat pada 1891 karena diracuni oleh kaki tangan Belanda¹⁸, ia digantikan oleh Tgk Chik di Tiro Muhammad Amin.

Tgk Muhammad Amin membangun pusat pertahanannya di Kuta Aneuk Galong, namun pada 26 Maret 1896 pasukan Belanda menyerang yang

¹⁶H.Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, (Medan: Harian Waspada Medan, 2007), hlm. 284.

¹⁷Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, terj Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 221.

¹⁸Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 57.

menyebabkan ia gugur pada pertempuran tersebut.¹⁹ Wali nanggroe sekaligus panglima perang selanjutnya adalah Tgk Chik Ubaidillah di Tiro, namun juga gugur karena terjangan peluru Belanda, lalu posisinya digantikan oleh Tgk Chik Lambada di Tiro yang juga gugur dalam pertempuran, posisi wali nanggroe digantikan oleh Muhammad Ali Zainal Abidin di Tiro yang juga mengalami nasib sama dengan pendahulunya yaitu gugur dalam pertempuran melawan Belanda.²⁰ Sesudah itu wali nanggroe digantikan oleh Tgk Chik Mahyiddin di Tiro yang hanya memimpin selama satu tahun, ia juga gugur dalam pertempuran di daerah Pidie. Wali nanggroe terakhir adalah Tgk Chik Ma'at di Tiro yang masih berumur 16 tahun. Ia syahid pada tanggal 9 Desember 1911 dalam perang di Alue Bhot perbukitan Tangse.²¹ Menurut Hasan Tiro atas dasar perjuangan keturunan di Tiro yang diawali dengan peristiwa diangkatnya Tgk Chik di Tiro sebagai pemimpin perang, maka kekuasaan beralih secara estafet kepada keturunan di Tiro.²²

Konsep pemikiran Hasan Tiro mengenai wali nanggroe tidak bisa ditemukan fakta sejarah sebagaimana yang ia kemukakan. Wali nanggroe yang ia rumuskan tidak bisa dilacak sumbernya, tidak ada dokumen sejarah yang sejalan dengan pertanyaan Hasan Tiro mengenai permasalahan tersebut.²³ Wali nanggroe

¹⁹Yusuf al-Qardhawi Al-Asyi, *Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional*,(Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2014), hlm. 30.

²⁰*Ibid.*, hlm. 31.

²¹Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata...*, hlm. 66.

²²M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 16.

²³Wawancara Rusdi Sufi, 17 November 2015.

tidak pernah ada dalam sejarah, hanya ada wali raja yaitu orang yang membantu raja dalam menjalankan roda pemerintahan dikarenakan kondisi sultan yang masih kecil.²⁴ Dalam buku *Aceh Sepanjang Abad*, dewan yang disebut Majelis Negara oleh Hasan Tiro adalah Dewan Majelis Rakyat yang dipimpin oleh kaum ulee balang dari tiga sagi. Ketika itu pada 28 Januari sultan Mahmud Syah mangkat akibat penyakit kolera, selanjutnya para panglima sagi yaitu panglima Polem dari XXII mukim, Cut Lamreueng dari XXVI Mukim, dan Cut Banta dari XXV mukim memilih seseorang yang masih berumur 6-7 tahun naik tahta yaitu Tuanku M. Dauh Syah dengan pangkuan dewan mangkubumi yang diketuai Tuanku Hasyim yang berwenang bertindak atas nama sultan.²⁵

Pimpinan dan perjuangan terus berjalan sebagaimana layaknya sebuah pemerintahan, setelah sultan dewasa barulah ia diberikan tanggung jawab penuh untuk memerintah. Ketika sultan diangkat menjadi sultan di Mesjid Indrapuri diangkat pula beberapa tokoh tingkat atas yang belum resmi berlangsung dalam pemerintahan kesultanan yaitu Tgk Chik di Tiro sebagai menteri perang, Tgk Umar Djohan Pahlawan menjadi laksamana, dan Panglima Nyak Makam sebagai panglima Aceh Timur.²⁶ Panglima Polem yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan pada tahun 1881 melantik Tgk Chik di Tiro di Indra Puri sebagai panglima perang. Ketika posisi Indra Puri terancam pusat pemerintahan

²⁴Wawancara Ramli A Dally, 19 November 2015.

²⁵H.Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, (Medan: Harian Waspada Medan, 2007), hlm. 48.

²⁶*Ibid.*, hlm 50.

dipindahkan ke Keumala dengan nama Kuta Keumala Dalam. Disini dapat dilihat posisi Tgk Chik di Tiro adalah sebagai menteri perang, jabatan menteri gelarnya wazir bukan wali nanggroe. Bahkan Tgk Chik di Tiro sendiri tidak pernah menyebut dirinya sebagai wali nanggroe. Namun keturunannya pernah menjadi wali dalam peperangan, mereka diberi wewenang untuk meminta hak sabil kepada seluruh rakyat sebagai pelaksana perang sabil.²⁷ Mungkin atas inilah muncul pemikiran dari Hasan Tiro bahwa keluarga di Tiro telah mendapatkan kepercayaan untuk tetap melanjutkan perjuangan pasca ditangkapnya sultan. Lahirnya ide wali dalam konsep politik Hasan Tiro merujuk pada arti wali itu sendiri yaitu seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mewakili, mengatur serta mengarahkan.

Hal lainnya adalah Tgk di Tiro menjelang akhir hayatnya mendapat wewenang chap sikureung dari sultan sebagai pemimpin agama tertinggi di negeri tersebut. Selanjutnya setelah ia wafat chap sikureung tanda mendapat wewenang dari kerajaan telah diberikan pada Habib Samalanga.²⁸ Habib Samalanga adalah seorang Sayyid yang lahir di Aceh, tinggal di Samalanga lalu ia ke Aceh Besar untuk ikut jihad, ia memperoleh Cap Siekureung dari istana sama seperti yang pernah dimiliki oleh Tgk Tiro yaitu posisinya setara dengan Hulu Balang.²⁹ Hulubalang atau Panglima Perang bertindak sebagai pegawai Besar

²⁷Wawancara Ramli A Dally, 19 November 2015.

²⁸Anthony Reid, *Asal Mula Konflik...*, hlm. 230.

²⁹Snouck Horgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, terj. Ng Singarimbun, cet.I, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 167 dan 206.

Kerajaanyang merupakan kakitangan kerajaan³⁰, inilah posisi yang diberikan kepada Tgk Chik di Tiro bukan wali nanggroe. Cap Sikureung adalah cap resmi kerajaan Aceh Darussalam penamaan cap Sikureung didasarkan pada bentuk cap yang mencantumkan sembilan nama sultan terdahulu di tengah cap terdapat nama sultan yang sedang memerintah.³¹ Dilihat secara seksama Tgk Chik di Tiro diberi wewenang secara sah dengan dibubuh cap sikureung sebagai pemimpin agama dan sebagai panglima perang, jika seseorang diberi sarakata yang dibubuhi cap sikureung orang tersebut tetap berada dibawah kekuasaan sultan.

Dalam sejarah Aceh peran ulama memang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Ulama memiliki peran sebagai penyebar ilmu dan dakwah Islam serta pendamping kekuasaan sultan. Ulama dan sultan adalah mitra sejajar yang bekerja untuk memimpin dan mendidik masyarakat serta menciptakan kehidupan yang adil dan makmur.³² Pada masa kerajaan Aceh Darussalam hingga berakhirnya, posisi ulama memang sangat di elu-elukan. Sultan dan ulee balang yang menduduki posisi sebagai kaum terpandang telah kehilangan posisi dan digantikan oleh sosok-sosok ulama besar yang memiliki daya tarik dalam perang melawan *kaphee* Belanda. Para ulama mendominasi perang gerilya dalam melawan Belanda, diantaranya adalah Tgk Chik di Tiro (1836-91), dan

³⁰Abdullah Sani Usman, *Nilai Sastera Ketatanegaraan dan Undang-Undang dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin*, (Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005), hlm. 31.

³¹Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial dan Pemerintah Aceh, 2009), hlm. 252.

³² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem Solusi dan Implementasi*, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 71.

perlawanan tersebut berubah sifat menjadi perang sabil kaum muslimin melawan kafir Belanda.³³

Ulama menjadi sosok pengayom masyarakat ditengah suasana yang tak menentu di pemerintahan, ditambah lagi pada saat itu banyaknya ulee balang yang bekerja sama dengan Belanda. Bahkan setelah sultan diasingkan ke Ambon pada 1907 dengan tiadanya sultan, masyarakat akhirnya berpaling kepada ulama termasuk Tgk Chik di Tiro dan Tgk Chik Kuta Karang yang tidak hanya sukses dalam memobilisasi massa tapi juga sukses terjun sebagai panglima perang.³⁴ Disamping itu keturunan di Tiro memang selalu ikut serta dalam berbagai perlawanan terhadap Belanda sebagai pemimpin perang gerilya baik di wilayah Aceh Besar maupun di wilayah Pidie.

Hasan di Tiro hanya berusaha mengangkat nama dari keluarganya saja, padahal jika memang benar gelar wali nanggroe sebagai penanggung jawab Negara Aceh yang ia maksudkan ada, maka nama Habib Samalanga yang juga pernah mendapat cap sikureung dari sultan bisa dimasukkan kedalam silsilah wali nanggroe. Namun pada saat menjelang berakhirnya kerajaan Aceh Darussalam rakyat Aceh berada dibawah pimpinan yang berbeda-beda jadi tak bisa dikatakan bahwa keturunan di Tiro sebagai pemimpin Negara Aceh pada saat itu. Pada Juni 1898 pimpinan kerajaan terpecah dalam 3 kelompok, yang pertama berada di Tangse di bawah pimpinan ibu Teuku Panglima Polem dan Panglima wanita Tgk

³³M.C. Rickflefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, penj Satrio Wahono dkk,(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta,2008), hlm. 311.

³⁴Amirul Hadi,*Aceh Budaya dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 203.

Fakinah, yang kedua berada dibawah pimpinan Muhammad Daud Meureudu, dan yang terakhir berada dibawah pimpinan Raja Keumala dan Teuku Panglima Muhammad Daud berangkat ke Jeunib.³⁵

Nama lain yang juga bisa dimasukkan namanya dalam silsilah tersebut adalah Tgk Daud Beureu-eh yang jelas-jelas pernah menjabat sebagai wali negara, bahkan Hasan di Tiro pun ikut serta dalam gerakan yang dipimpin oleh Daud Beureu-eh. Hasan Tiro adalah orang yang berusaha memasukkan persoalan DI-TII ke dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengirim surat terbuka kepada perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.³⁶ Akibat tindakan ini Hasan di Tiro mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan juga dikenal oleh dunia Internasional. Namun posisi Daud Buereu-eh sebagai wali negara tak bisa disamakan dengan Hasan Tiro sebagai wali nanggroe karena tujuan mereka berbeda, disamping itu Hasan Tiro tidak mencantumkan nama Daud Beureu-eh dalam sarakata wali nanggroe miliknya jadi jika ada pendapat Daud Beureu-eh maupun nama lainnya bisa saja dimasukkan dalam sarakata tersebut maka itu hanya sekedar pendapat karena Hasan Tiro sebagai pemilik ide tidak mencantumkan nama tersebut.³⁷

Gerakan Hasan Tiro sebelum dicetuskan ia sempat meminta izin kepada Daud Beureu-eh. Pada awal 1970 Zainal Abidin Tiro mantan Menteri Dalam

³⁵A Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm 31.

³⁶M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk Muhammad Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm 13.

³⁷Wawancara Samsudin Jalil, 2 Desember 2015.

Negeri pada Kabinet Hasan Ali pergi ke Amerika untuk menemui adiknya Hasan Tiro. Sepulangnya dari sana terdengar desas-desus bahwa Hasan tiro menganjurkan kepada Daud Bereu-eh dan rakyat Aceh untuk memberontak lagi terhadap pemerintahan Orde Baru.³⁸ Daud Beureu-eh dengan sukarela menyerahkan pucuk pimpinan nasional Aceh kepada Hasan di Tiro dan mengarahkan pengikutnya untuk membantu perjuangan kebangsaan Aceh, walaupun sebenarnya ada perbedaan pendapat antara keduanya, namun hal ini dilakukan demi Aceh Merdeka.³⁹ Setelah Hasan Tiro berhasil mendirikan Negara Islam, ia menunjuk dirinya sendiri sebagai pemimpin tertinggi dengan gelar wali nanggroe, sedangkan Daud Beureu-eh diposisikan sebagai mufti empat.⁴⁰

Hasan Tiro juga pernah dianggap sebagai pembohong karena ketika pemberontakan Daud Beureu-eh ia dikirim uang untuk membeli perlengkapan senjata namun senjata tersebut tak pernah sampai kepada pihak Daud Beureu-eh.⁴¹ Tetapi jika dilihat maksud dan tujuan dari kedua gerakan tersebut, gerakan Daud Beureu-eh memiliki tujuan yang berbeda dengan gerakan Hasan Tiro. Gerakan Aceh Merdeka bertujuan untuk mendirikan negara sekuler berbentuk kerajaan, sedangkan DI/TII bertujuan memisahkan diri dari Indonesia akan tetapi hanya

³⁸ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta: Grafiti, 1992), hlm. 373.

³⁹ Husaini M. Hasan, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, (Jakarta: Batavia Publishing, 2015), hlm 128.

⁴⁰ Lihat www.kba13.com/2015/04/misteri-gelar-wali-nanggroe.html?m=1. Diakses 6 Mei 2015.

⁴¹ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh...*, hlm. 210.

sekedar menuntut dipulihkannya Provinsi Aceh yang dilebur masuk Provinsi Sumatera Utara dan menuntut Aceh menjadi daerah Istimewa.⁴²

Selanjutnya ketika mendirikan gerakan bentukannya, ada beberapa hal yang dirasa kurang masuk akal mengenai pemikirannya. Ideologinya dianggap melenceng dari syariat Islam, ia ingin Aceh kembali pada bentuk kerajaan namun ketika diusulkan untuk memanggil Tuanku Ibrahim di Banda, ia marah, tentang pijakan sejarah ia hanya berpijak pada Tgk Chik di Tiro dan keluarganya, saat syahidnya Teuku Ma'at di Tiro.⁴³ Hasan Tiro berusaha membuat sebuah negara pengganti, menjadi dinasti di Tiro dengan tidak mengakui sultan terakhir kerajaan Aceh Darussalam yaitu Muhammad Daud Syah yang ditabal sesuai konstitusi pada saat itu.⁴⁴ Hasan Tiro berusaha menutupi kepemimpinan para raja terdahulu bahwa setelah raja wafat, kerajaan dan segenap silsilahnya juga ikut menghilang.⁴⁵

Padahal silsilah kepemimpinan sultan kerajaan Aceh Darussalam jelas terdapat buktinya. Berikut ikhtisar kronologis dari para sultan Aceh :⁴⁶

1. Sultan Ali Moeghajat Sjah atau Raja Ibrahim (1514-1528)
2. Sultan Sala ad-din (1528-1537)

⁴²Geerhan Lantara, *Aceh Menggugat Penolakan Masyarakat Aceh Terhadap Gam*,(ttp:tp,2004), hlm ix.

⁴³Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*,(Jakarta: Madani Press,1999), hlm. 140.

⁴⁴Wawancara Ramli A Dally, 19 November 2015.

⁴⁵Wawancara Rusdi Sufi, 17 November 2015.

⁴⁶ K.F.H Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, terj. Aboe Bakar, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Dokumen Informasi Aceh, 2001), hlm. 91-93.

3. Sultan Ala ad-din Riajat Sjah a-kahhar (1537-1568)
4. Sultan Ali Riajat Sjah atau Hoesein (1568-1575)
5. Sultan Moeda (1575)
6. Sultan Sri Alam (1576)
7. Sultan Zein al-abidin (1576-1577)
8. Sultan Ala ad-din atau Masoer Sjah (1577-1586)
9. Sultan Ali Riajat Sjah atau Radja Boejoeng (1586-1588)
10. Sultan Ala ad-din Riajay Sjah atau Sajjid al-moekammal (1588-1604)
11. Sultan Ali Riajat Sjah atau Sultan Moeda (1604-1607)
12. Sultan Iskandar Moeda (1607-1636)
13. Sultan Iskandar Thani Ala ad-din Moghajat Sjah (1636-1641)
14. Sultan Tadj al-alam Safiat ad-din Sjah (1641-1675)
15. Sultan Noer al-alam Nakiat ad-din Sjah (1675-1678)
16. Sultan Inajat Sjah Zakiat ad-din Sjah (1678-1688)
17. Sultan Kamalat Sjah Zinatuddin (1688-1699)
18. Sultan Badr al-alam Sjarif Hasjim Djamal ad-din 1699-1702)
19. Sultan perkasa Alam Sjarif Lamtoei ibn Sjarif Ibrahim (1702-1703)
20. Sultan Djamal al-alam Badr al-Moenir (1703-1726)
21. Sultan Djauhar al-alam Ama ad-din Sjah (1726)
22. Sultan Sjams al-alam (1726)
23. Sultan Ala ad-din Ahmad Sjah atau Maharadja Lela Melajoe (1726-1735)
24. Sultan Ala ad-din Djohan Sjah (1735-1760)
25. Sultan Mahmoed Sjah (1760-1781)

26. Sultan Ala ad-din Moehammad Sjah (1781-1795)
27. Sultan Ala ad-din Djauhar al-alam Sjah (1795-1824)
28. Sultan Moehammad Sjah (1824-1836)
29. Sultan Ala ad-din Ibrahim Manshur Sjah (1836-1870)
30. Sultan Ala ad-din Mahmud Sjah (1870-1874)
31. Sultan Ala ad-din Moehammad Daud Sjah II (1874-1903). Ditabal pada hari Kamis 26 Desember 1878 di Mesjid Indra Puri dan mangkat dalam pembuangan di Jatinegara pada tahun 1939, tidak pernah dimakzulkan secara adat Aceh.

Mengenai gelar “Al-Mukarram Al-Malik Al-Mudabbir” yang diberikan kepada keluarga di Tiro kala itu panggilan tersebut lebih berbaur pada agama. Gelar ini dapat ditemukan dalam salinan surat yang dikirim oleh Belanda kepada keturunan di Tiro agar bersedia menghentikan serangan terhadap Belanda. Surat tersebut dibubuhi stempel pemuka rakyat Aceh yaitu Tuanku Mahmud, anggota keluarga sultan yang dulu, Panglima Polem, dan iparnya Tuanku Raja keumala pada tahun 1909.⁴⁷ Ini berarti walaupun raja telah dipaksa menyerah oleh Belanda, sultan masih tetap menjadi pemimpin rakyat Aceh meski tidak lagi memiliki kekuasaan.

Dalam surat tersebut hanya Tgk Chik di Tiro yang diberi gelar “Al-Mukarram Maulana Al-Mudabbar Al-Malik”, sedangkan anaknya yaitu Mahyiddin dan Di Buket hanya dipanggil dengan sebutan Teungku. Gelar atau panggilan “Al-Mukarram” ini diberikan sebagai bentuk penghargaan terlebih

⁴⁷H.C Zentgraaff, *Aceh*, terj. Aboe Bakar, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), hlm. 44.

sosok Tgk Chik di Tiro memang ulama yang sangat legendaris. Al-Mukarram hingga saat ini masih banyak digunakan untuk panggilan pada ulama-ulama besar yang dikagumi dan dihormati sebagai sosok pemimpin agama khususnya di kalangan masyarakat Aceh. Jika merujuk pada makna wali yang sebenarnya, wali merupakan gelar keagamaan pada seorang manusia yang dekat dengan Allah bahkan memiliki kekeramatan, yang mana mereka terkadang menjadi penasihat raja dan pemegang otoritas keagamaan tertinggi.⁴⁸ Sarakata yang ada dalam tulisan Hasan Tiro hanya menunjukkan panggilan “Al-Mukarram Al-Mudabbir Al-Malik” bukan sarakata pengangkatan sebagai wali negara, sarakat itu sendiri berisi tentang ajakan sultan kepada ulama di Tiro untuk menyerah kepada Belanda.⁴⁹

Konsep wali nangroe yang dipakai oleh Hasan di Tiro adalah untuk menegaskan bahwa keluarga di Tiro adalah pemimpin baru rakyat Aceh yang bukan kesinambungan atau bagian dari kesultanan Aceh, keluarganya adalah pemimpin dan penguasa politik tertinggi yang setara dengan posisi sultan.⁵⁰ Mungkin atas dasar pemikiran inilah Hasan di Tiro mengklaim wali nangroe sebagai istilah atau sebutan bagi pemimpin baru di Aceh pasca hilangnya kerajaan Aceh Darussalam yang turun temurun di warisi oleh keluarga di Tiro.

Gerakan Aceh Merdeka bentukan Hasan Tiro memang sejak awal telah meletakkan dasar hak sejarah keluarga Tiro terhadap Aceh, selanjutnya diramu

⁴⁸ Lihat www.kba13.com/2015/04/misteri-gelar-wali-nangroe.html?m=1. Diakses 6 Mei 2015.

⁴⁹ Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata...*, hlm. 59.

⁵⁰ Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm 205.

dengan konflik yang terjadi di masyarakat sehingga gerakan ini mampu menarik perhatian serta dukungan dari sebagian masyarakat.⁵¹ Hasan Tiro membawa nama besar keluarga di Tiro untuk menarik simpati rakyat agar ikut berjuang melanjutkan perjuangan ulama kharismatik Tgk Chik di Tiro. Istilah wali nangroe yang muncul saat ini tidak pernah dijumpai dalam sejarah supremasi hukum dalam pemerintahan Aceh saat dulu dan sebelum Mou Helsinki ditetapkan.⁵²

Gerakan Aceh Merdeka tidak bisa dikatakan sebagai gerakan seluruh rakyat Aceh yang menuntut kemerdekaan. Gerakan ini hanya mementingkan kepentingan golongannya yang mengakibatkan rakyat Aceh hidupnya semakin carut marut. Gerakan Aceh Merdeka pimpinan Hasan Tiro merupakan tindakan yang mencari keuntungan pribadi saja, sebab tingkah laku Hasan Tiro tidak hanya berkhianat terhadap RI tetapi juga kepada pemimpin Aceh Tgk Muhammad Daud Beureu-eh dan rakyat Aceh dengan menjual hasil bumi untuk kepentingan sendiri.⁵³

⁵¹ Hasballah M Saad, “ Amok Aceh”, dalam Tulus Widjanarko dan Asep S Sambodja (ed.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, (Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999), hlm 25.

⁵²Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 213.

⁵³Ibrahim Alfian, “ Operasi Militer itu Membabi Buta”, dalam Tulus Widjanarko dan Asep S Sambodja (ed.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, (Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999), hlm. 134.

B. Peran Wali Nanggroe

Konsep wali nanggroe pertama sekali muncul saat lahirnya gerakan Darul Islam Aceh di bawah pimpinan Daud Beureu-eh. Dinamakan wali karena memiliki arti pemimpin, pelindung, kurator, amanah, dan sosok yang berbudi pekerti mulia serta bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan arti wali itu sendiri dalam literatur Islam yang identik dengan tuntutan ajaran Islam dimana pemimpin mesti fatanah dan amanah.⁵⁴

Wali negara yang disandang oleh Daud Beureu-eh adalah gelar sebagai pemimpin negara tertinggi yang ingin menjadikan Aceh sebagai Negara Islam. Ketika menjabat sebagai wali negara, ia dibantu oleh beberapa orang menteri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tapi tak jarang pula sang wali turun tangan sendiri untuk menyelesaikan masalah. Ia sering berkeunjung ke berbagai daerah baik didalam maupun diluar Aceh untuk berpidato. Pidato tersebut dilakukan didepan orang banyak guna mencari dukungan serta simpatisan yang berkenan ikut serta untuk mendirikan negara Islam.

Walaupun pada akhirnya perjuangan Daud Beureu-eh dianggap sebagai gerakan pengacau keamanan. Namun dibalik kekacauan yang ia timbulkan, terdapat pula hal positif yang berhasil diraih. Berikut beberapa hal yang berhasil diperoleh dari perjuangan Daud Beureu-eh :⁵⁵

⁵⁴Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing,2013), hlm.206.

⁵⁵Ali Hasjmy dkk., *50 Tahun Aceh Membangun*, (Majelis Ulama Aceh Provinsi Daerah Aceh,1995), hlm. 191.

1. Perluasan Masjid Raya Baiturrahman dan penambahan kubah dari 3 menjadi 5 serta pembangunan menara mesjid.
2. Pengembalian status provinsi Daerah Istimewa Aceh tingkat I bagi daerah Aceh.
3. Pengesahan predikat Daerah Istimewa Aceh dalam bidang keagamaan, pendidikan dan peradatan kebudayaan bagi provinsi Aceh.
4. Pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam sebagai pusat ilmu pengetahuan dan jantung hati rakyat.

Selanjutnya wali nanggroe menurut Hasan Tiro istilah wali yang ia pakai diibaratkan seperti seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya, sementara ia belum dewasa, sehingga diperlukan orangtua untuk menjaga dan melindunginya. Inilah yang terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Tgk Hasan di Tiro beliau menyadari Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman dipercayakan oleh majelis negara sebagai kepala pemerintahan dengan sebutan al-Mukarram, Al-Malik, dan Al-Mudabbir tahun 1877, yang bukan berasal dari darah biru sultan Aceh tetapi dari ulama Tiro, untuk itu Hasan di Tiro enggan menyebut Sultan tapi menyebutnya sebagai wali nanggroe.⁵⁶ Atas dasar inilah ia menyebut dirinya sebagai wali ke 8 meneruskan perjuangan para pendahulunya membebaskan diri dari belenggu penjajahan termasuk kepemimpinan elit politik di Jakarta ia anggap sebagai bentuk penjajahan oleh bangsa Jawa terhadap Aceh.

⁵⁶Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad...*, hlm.

Hasan Tiro dalam menjalankan roda pemerintahan bentukannya dibantu oleh pengikutnya yang mengisi posisi sebagai menteri. Jabatan wali nanggroe yang ia sandang mengaskan kepemimpinannya terhadap rakyat Aceh berdasarkan idenya sendiri. Ketika menduduki posisi wali nanggroe Hasan Tiro juga bertanggung jawab sebagai menteri pertahanan serta menteri luar negeri. Ia juga berkeliling Aceh maupun luar Aceh untuk mencari dukungan dan pengikut yang berasal dari berbagai kalangan.

Ia juga mencari dukungan politik dari dunia Internasional dengan berbagai cara yang mungkin untuk dilakukan. Namun karena keadaan gerakan ini tercium oleh aparat Hasan di Tiro bersembunyi keluar negeri. Perjuangan GAM diteruskan oleh pengikutnya sedangkan Hasan Tiro bergerak dibelakang layar.

Hasan Tiro memposisikan diri sebagai pemimpin tertinggi yang membuat kebijakan terhadap gerakan politik yang ia cetuskan. Wali nanggroe Tgk Hasan di Tiro selain menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan juga menjabat sebagai menteri pertahanan juga sebagai menteri luar negeri.

C. Eksistensi Wali Nanggroe Masa Kini

Perdebatan perihal wali negara sudah muncul sejak pembahasan rancangan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁵⁷ Rancangan ini membahas tentang segala sesuatu yang terkait

⁵⁷Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 209

langsung dengan kepentingan Aceh akan dijadikan dalam bentuk qanun, lalu urusan lainnya yang tidak terkait, mengacu pada undang-undang nasional. Hal lainnya yang diagendakan adalah tentang pelebagaan wali nanggroe sebagai sebuah lembaga yang bukan bersifat politis, melainkan sebagai sebuah lembaga yang menjalankan kewenangan di dalam lingkup budaya.

Konflik antara GAM dan RI sebelumnya telah berlangsung selama 29 tahun yang banyak memakan korban jiwa baik dari pihak yang bertikai maupun rakyat sipil. Konflik ini dapat diakhiri setelah terjadinya musibah gempa dan tsunami di Aceh pada Desember 2004. Musibah yang memakan banyak korban jiwa telah menarik simpati dari berbagai pihak termasuk pihak-pihak yang telah berkonflik selama ini. Usaha perdamaian yang telah beberapa kali mengalami kegagalan akhirnya mencapai kata sepakat pada tahun 2005.

Dalam salah satu bulir perjanjian tersebut adalah tentang lembaga wali nanggroe yang akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Namun pihak GAM tidak menjelaskan fungsinya secara rinci mengenai lembaga wali nanggroe dibandingkan UU No.18 Thn. 2001 menyebutkan secara jelas maksud dari lembaga wali nanggroe. Pada UU No.11 Thn 2006 lebih rinci menjabarkan :⁵⁸

1. Wali nanggroe dan tuha nanggroe adalah mitra kerja pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁵⁸Baihaqi, "Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh", *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, Januari 2014, hlm. 12.

2. Wali nanggroe dan tuha nanggroe dapat menentukan lambang, simbol panji kemegahan yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wali nanggroe yang sebelumnya berkedudukan sebagai kepala negara berubah menjadi simbol bagi penyelenggaraan kehidupan adat, hukum adat-istiadat, budaya, pemberian gelar/derajat serta upacara adat lainnya sesuai dengan budaya Aceh dan syari'at. Qanun wali nanggroe dalam tiap pembahasannya selalu mengalami perubahan maksud dan tujuannya. Pada tahun 2007 wali nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga adat, pada tahun 2010 wali nanggroe ditempatkan sebagai sebuah lembaga politik namun hal ini ditolak oleh banyak pihak, dikarenakan rancangan qanun 2010 lebih dekat pada bentuk pemerintahan monarki sedangkan masyarakat sekarang lebih mengedepankan sistem demokrasi yang dianggap lebih bisa menampung aspirasi masyarakat.⁵⁹

Dibalik kontroversi yang berkembang di masyarakat maupun di elit politik, wali nanggroe beserta perangkatnya dilantik pada penghujung tahun 2013. Wali nanggroe yang dilantik adalah T. Malik Mahmud al-Haytar sebagai paduka yang mulia wali nanggroe yang kesembilan. Ini berdasarkan perhitungan silsilah wali nanggroe dari silsilah keturunan Hasan di Tiro dari kakek buyutnya Tgk Chik Muhammad Saman di Tiro hingga Hasan di Tiro, walaupun Malik Mahmud bukanlah keturunan Tgk Chik di Tiro. Pengangkatan ini dilakukan karena tidak

⁵⁹ Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik...*, hlm. 209.

ada peraturan yang jelas mengenai siapa pengganti selanjutnya, Malik Mahmud dipilih karena hubungannya yang dekat dengan Hasan Tiro.⁶⁰

Tepatnya pada hari senin 16 Desember 2013, Malik Mahmud al-Haytar mengucapkan sumpahnya sebagai wali yang ke 9 dengan gelar “Al Mukarram Maulana al Mudabbir al Malik”. Malik Mahmud menggantikan posisi wali ke 8 yaitu Tgk Hasan Muhammad di Tiro yang meninggal pada 3 Juni 2010. Acara pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Utama Dewan JI Tgk Daud Beureu-eh dalam Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Sumpah tersebut ditandatangani oleh Tengku Malik Mahmud Al-Haytar selaku wali nangroe dan dua saksi yakni, Gubernur Aceh Dr. H Zaini Abdullah dan ketua DPR Aceh Drs. H Hasbi Abdullah MS.⁶¹

Berikut table daftar susunan wali nangroe berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nangroe.

⁶⁰Wawancara Rusdi Sufi 17 November 2015

⁶¹ Dadang Heriyanto, "Satu Aceh Dua Penguasa", *Modus Aceh*, Edisi 16-24 September 2013, hlm 8.

No	Nama Wali Nanggroe	Masa Jabatan /keterangan
1	Tgk Chik di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah	28 Januari 1874-31 Desember 1891
2	Tgk Chik di Tiro Muhammad Amin bin Muhamma Saman	1 Januari 1892-1896
3	Tgk Chik di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman	1896-1898
4	Tgk Chik di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman	1898-1902
5	Tgk Chik di Tiro Ubaidillah bin Muhammad Saman	1902-1905
6	Tgk Chik di Tiro Mahyuddin bin Muhammad Saman	1905-11 Desember 1910
	Tgk Chik ulee Tutue alias Tgk Chik di Garot Muhammad	11 Desember 1910-3 Juni 1911/ pemangku WN
7	Tgk Chik di Tiro Muaz bin Muhammad Amin	4 Juni 1911-3 Desember 1911
8	Dr Teungku Hasan Muhammad di Tiro	4 Desember 1976-3 Juni 2010
9	Tengku Malik Mahmud Al-Haytar	2 November 2012

Berikut penjelasan umum mengenai Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe :⁶² Sejarah awal lahirnya Wali Nanggroe. Dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh di masa berperang melawan penjajah Belanda, Ketua Madjelis Tuha Peuet Aceh menyerahkan perangkat Kerajaan Aceh kepada Wali Nanggroe yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1874. Kerajaan Aceh telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara

⁶²Keurukon Katibul Wali, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*, hlm. 94-95.

Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berperan memberikan sumbangsih besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan juga dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe ini, tidaklah dimaksudkan sebagai nostalgia dan upaya kembali ke masa lalu, tetapi harus diartikan sebagai apresiatif respon terhadap nilai-nilai yang pernah ada, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Qanun Al-Asyi Kerajaan Aceh Darussalam untuk kita kembangkan menjadi nilai baru yang mampu merespon perkembangan masa kini.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung. Lembaga Wali Nanggroe beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substantial harus menjadi kekuatan alternative dalam penyelenggaraan berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

Ada beberapa jabatan penting dalam Lembaga Wali Nanggroe yaitu :⁶³

- a. Waliyul'ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, apabila Wali Nanggroe tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
- b. Majelis fatwa adalah Majelis Tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafi'I sebagai mazhab mayoritas dan mengakui tiga mazhab lainnya yang ahlussunnah waljamaah.
- c. Mufti adalah Ketua Majelis Fatwa.
- d. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe adalah Majelis tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh komisi Pemilihan Tuha Peuet dan di tetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- e. Majelis Tuha Lapan adalah Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya berasal dari para imum mukim kabupaten kota
- f. Kerukon Katibul Wali adalah Lembaga Kesekretarian pada Lembaga Wali Nanggroe
- g. Majelis Perempuan adalah Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nanggroe.

⁶³*Ibid.*, hlm. 5-6

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Wali Nanggroe memuat tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe sebagai berikut :⁶⁴

- a. Mempersatukan rakyat Aceh
- b. Meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menjaga perdamaian
- c. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamaddun Aceh, dan
- d. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon Wali Nanggroe dan calon Waliul'ahdi :

- a. Orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
- b. Sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 tahun hijriah
- c. Dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik
- d. Dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas
- e. Berakhlak mulia dan tidak zalim
- f. Berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas
- a. Berani dan benar serta bertanggung jawab
- g. Adil, jujur, setia, dan amanah
- h. Penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang
- i. Mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat

⁶⁴*Ibid.*, hlm 51 dan 53.

Susunan Lembaga Wali Nanggroe berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut :

1. Susunan kelembagaan Wali Nanggroe
 - a. Wali Nanggroe
 - b. Waliyul'ahdi
 - c. Majelis Tinggi
 - d. Majelis Fungsional
 - e. Lembaga Struktural
2. Majelis Tinggi terdiri dari
 - a. Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe
 - b. Majelis Fatwa
 - c. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe
3. Majelis fungsional terdiri dari
 - a. Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA)
 - b. Majelis Adat Aceh
 - c. Majelis Pendidikan Aceh
 - d. Majelis Ekonomi Aceh
 - e. Baitul Mal Aceh
 - f. Bentara
 - g. Majelis Hutan Aceh
 - h. Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh
 - i. Majelis Kesejahteraan sosial dan Kesehatan
 - j. Majelis perempuan

Wali nanggroe masa dulu jelas berbeda dengan wali nanggroe yang ada pada saat ini. Wali nanggroe pada masa dulu adalah pemimpin pemberontakan yang bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kedudukannya tidak dibawah pemerintahan Republik Indonesia. Sedangkan wali nanggroe sekarang beralih fungsinya menjadi pemersatu adat dan tunduk di bawah pemerintahan Indonesia. Selain itu wali nanggroe erat kaitannya dengan politik padahal khusus dibidang adat sudah adat MAA (Majelis Adat Aceh), fungsinya juga belum jelas dan masih dipersoalkan untuk saat ini hanya ikut serta dalam acara tertentu bersama gubernur.⁶⁵

Wali nanggroe yang telah dibentuk pada saat ini tidak hanya mendapat penolakan dari rakyat saja, tapi juga dari kalangan mantan GAM sendiri yang disampaikan melalui siaran pers pada 11 November 2012.⁶⁶ Berdasarkan siaran pers tersebut, GAM atau yang nama lainnya Aceh-Sumatera National Liberation Front (ASNFL) menyatakan bahwa tidak ada hubungan apapun antara Lembaga Wali Nanggroe yang merujuk pada sejarah bangsa Aceh dengan Lembaga Wali Nanggroe dengan produk Helsinki.⁶⁷ Mereka tidak setuju dengan maksud dan tujuan wali nanggroe sekarang karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Hasan di Tiro.

⁶⁵ Wawancara Rusdi Sufi, 17 November 2015.

⁶⁶ Lihat www.asnfl.org/Siaran_Pers_11_November_2012, diakses 6 Mei 2015

⁶⁷ *Ibid*

Wali nanggroe yang dimaksud Hasan Tiro adalah wali negara atau kepala Negara yang merdeka dan berdaulat bukan wali nanggroe sebagaimana pemimpin tertinggi adat dan berada dibawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Terlepas dari pro-kontra dan benar tidaknya dari aspek sejarah wali nanggroe sekarang dianggap sah karena diakui oleh qanun, namun qanun ini pula bisa diubah kapan saja tergantung siapa yang memimpin .⁶⁸ Wali nanggroe sebenarnya diperlukan untuk mengontrol pemerintahan yang ada namun satu hal yang dipermasalahkan yaitu nomor urut yang ada dalam sarakata milik Hasan Tiro karena tidak bisa ditemukan dalam sejarah.⁶⁹

Malik Mahmud Al-Haytar yang saat ini menjabat sebagai wali nanggroe bernama asli Malik Khaidir Mahmud yang mana hingga saat ini tidak ada catatan yang jelas mengenai siapa sosok Malik Mahmud sebenarnya. Malik Mahmud lahir tahun 1939 di Singapura, ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di perantauan mengikuti orangtuanya yang bekerja sebagai saudagar di Singapura.⁷⁰ Tahun 2002 adalah era penting baginya setelah perjalanan panjangnya bersama Hasan Tiro sejak saling mengenal pada tahun 1964. Tahun itu adalah penetapan sekaligus pengukuhan dirinya sebagai Perdana Menteri GAM sekaligus Pemangku wali nanggroe yang artinya ia dapat bertindak sebagai pelaksana tugas wali nanggroe apabila sang wali berhalangan.

⁶⁸Wawancara Samsudin 2 Desember 2015.

⁶⁹Wawancara Ramli A Dally, 19 November 2015.

⁷⁰Martha Andival dan Marizal, "*Siapa Malik Mahmud?*", *Modus Aceh*, Edisi 16-24 September, hlm. 10.

Tampilnya Malik Mahmud sebagai wali nanggroe patut dipertanyakan atas dasar hukum apa ia diangkat sebagai wali nanggroe, menurut ASNFL ia tidak memenuhi syarat yang dapat diterima oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh apalagi lembaga ini dibentuk untuk memenuhi kepentingan segelintir elit politik.⁷¹ Sepertinya lembaga ini dibentuk untuk bisa meneruskan eksistensi mantan pengikut Gerakan Aceh Merdeka dengan membawa-membawa latarbelakang sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Dibalik kepentingan sekelompok orang, di dalam lembaga wali nanggroe terdapat qanun yang berusaha melindungi kepentingan rakyat Aceh, dan kedaulatan Aceh.⁷² Namun walaupun dibentuk untuk kepentingan rakyat Aceh agar tidak kehilangan kerajaan dan adat, pembentukan wali nanggroe harus beralasan, dapat dipercaya dan tidak menipu sejarah.⁷³

⁷¹Lihat [www.asnfl.org/Siaran Pers 11 November 2012](http://www.asnfl.org/Siaran_Pers_11_November_2012), diakses 6 Mei 2015

⁷²Wawancara Samsudin Jalil, 2 Desember 2015.

⁷³Wawancara Ramli A Dally, 19 November 2015.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wali nanggroe pertama kali disandang oleh Daud Beureu-eh ketika mendirikan Daulah Islam Negara Bagian Aceh, dan Republik Islam Aceh (RIA). Wali nanggroe bentukan Daud Beureu-eh memiliki latar belakang Islam yaitu berubahnya sistem politik era kerajaan menjadi sistem politik Islam, oleh karena itu pemimpin tidak lagi disebut raja tapi wali.

Wali nanggroe menurut Hasan Tiro diibaratkan seorang anak yang masih memerlukan seorang pengayom karena ditinggal mati oleh orangtua, hal inilah yang terjadi ketika kerajaan Aceh Darussalam mengalami kehancuran dengan tertangkapnya sultan maka kepemimpinan diserahkan kepada Tgk Chik Muhammad Saman di Tiro yang selanjutnya secara turun temurun dipegang oleh kerabat di Tiro hingga Hasan di Tiro. Namun keberadaan wali nanggroe hanya bisa didapati ketika Daud Beureu-eh dan Hasan Tiro, sebelumnya baik ketika Aceh berbentuk kerajaan maupun sesudah itu tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan keturunan di Tiro sebagai pemimpin Aceh yang posisinya setara dengan sultan.

2. Merujuk kepada data yang diperoleh, wali nanggroe hanya pernah dijabat oleh Daud Beureu-eh dan Hasan Tiro. Wali nanggroe disandang oleh Daud Beureu-eh ketika ia berperan sebagai tokoh yang berusaha memperjuangkan Aceh sebagai Negara Islam serta menganut Islam sebagai ideologi secara

kaffah. Sedangkan wali nanggroe menurut Hasan Tiro adalah mendirikan kembali kerajaan Aceh yang berdaulat namun hanya merujuk pada ide politik rancangannya.

3. Eksistensi wali nanggroe masa dulu jelas berbeda dengan masa kini. Dulu gelar wali nanggroe berarti pemimpin tertinggi yang menggantikan posisi sultan. Wali nanggroe masa dulu digunakan oleh pemimpin pemberontakan Aceh yang ingin merdeka mengatur pemerintahan sendiri.

Wali nanggroe saat ini adalah sebuah lembaga yang lahir dari perjanjian damai antara RI dan GAM yang dikenal dengan MoU Helsinki. Wali nanggroe adalah lembaga pemersatu adat dan menjaga kemakmuran, keadilan dan perdamaian, juga memiliki tugas lainnya yang diatur dalam Qanun Aceh tentang lembaga wali nanggroe No 8, 9 dan 10. Wali nanggroe saat ini berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali nanggroe saat ini dibentuk dengan dalih untuk menjaga adat istiadat yang sudah ada sejak masa kerajaan Aceh Darussalam.

B. Saran

Saran penulis bagi peneliti selanjutnya agar lebih banyak lagi mengungkap data-data tentang sejarah wali nanggroe yang sesungguhnya dan kepada generasi selanjutnya khususnya penerus Aceh untuk mendalami sejarah Aceh agar tidak melupakan jati diri yang sesungguhnya.

Kepada elemen masyarakat dan khususnya kepada instansi pemerintahan dan para elit politik diharapkan dapat membuat kebijakan politik yang tidak hanya melindungi rakyat tapi juga menipu sejarah yang sebenarnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan maupun kesalahan dan kesilapan dalam hal pengetikan dan isi yang terkadang dalam penjelasan masih kurang menyentuh dari pokok bahasan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kepada pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboe Bakar dkk, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia*, cet 2 Jakarta: Budi Pustaka,2008
- Abdullah Sani Usman, *Krisis Legitimasi Politik dalam Sejarah Pemerintahan di Aceh*, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010
- Abdullah Sani Usman, *Nilai Sastera Ketatanegaraan dan Undang-Undang dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanus Salatin*, Malaysia: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005
- Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, Jakarta: Madani Press,1999
- A Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, terj Abdul Hayyit al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Amirul Hadi, *Aceh Sejarah Budaya dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,2010
- Anas M.Yunus, *Gerak Kebangkitan Aceh Kumpulan Karya sejarah M Yunus Djamil*,Bandung: Bina Biladi Press, 2009
- Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, terj Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2005
- Baihaqi, “Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh”, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Volume 11 Nomor 01, Januari 2014
- Dadang Heriyanto, ”Satu Aceh Dua Penguasa”, *Modus Aceh*, Edisi 16-24 September 2013
- Darwis A Soelaiman ed, *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Pemerintah Provinsi NAD,2008
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2003

- Dudung Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2000
- M.Dien Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Geerhan Lantara, *Aceh Menggugat Penolakan Masyarakat Aceh Terhadap Gam*, 2004
- Hasballah M Saad, “ Amok aceh”, dalam Tulus Widjanarko dan Asep S Sambodja (ed.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999
- Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Elemen-elemen Politik Islam*, Yogyakarta: Ak Group dan Ar-Raniry Press, 2006
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Sejarah Aceh dan Tsunami*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005
- Hasan M. Di Tiro, *Aceh di Mata Dunia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013
- Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Grafiti, 1992
- H.C Zentgraaff, *Aceh*, terj. Aboe Bakar, Jakarta: Penerbit Beuna, 1983
- H.M Zainuddin, *Tarikh Aceh dan Nusantara*, cet 2 Banda Aceh: LKPSM Aceh: 2012
- H. Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*, Medan: Harian Waspada Medan, 2007
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Teuku Muhammad Daud Beureu-eh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2007
- Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Politik dan Masa depannya*, Jakarta: PT Cita Panca Serangkai, 1993
- Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008
- Harapandi Dahri, *Wali dan Keramat dalam Islam*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007

- Husaini M.Hasan, *Dari Rimba Aceh ke Stockholm*, Jakarta: Batavia Publishing, 2015
- Ibrahim Alfian, “Operasi Militer itu Membabi Buta”, dalam Tulus Widjanarko dan Asep S Sambodja (ed.), *Aceh Merdeka dalam Perdebatan*, Jakarta: PT Cita Putra Bangsa, 1999
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2012
- Kementrian Agama RI, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012
- Keurukon Katibul Wali, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe*,
- K.F.H Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, terj. Aboe Bakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Dokumen Informasi Aceh, 2001
- Labib Mz, *Perbedaan Wali Allah dengan Wali Syaitan*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2004
- Martha Andival dan Marizal, “Siapa Malik Mahmud?”, *Modus Aceh*, Edisi 16-24 September
- M.C. Rickflefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, penj Satrio Wahono dkk, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008
- M.Dien Madjid, *Catatan Pinggir Sejarah Aceh*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013
- M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000
- Muliadi Kurdi, *Aceh di Mata Sejarawan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial dan Pemerintah Aceh, 2009
- M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk Muhammad Daud Beureu-eh Dalam Pergolakan Aceh*, Jakarta: Media Da'wah, 2001
- Muchtaruddin Ibrahlim, *Riwayat Hidup dan Perjuangan Tuanku Hasyim Bangta Muda Panglima Tertinggi Angkatan Perang Aceh*, Jakarta: Departemen P dan K, 1977

Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik; Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem Solusi dan Implementasi*, Jakarta: Logos, 2003

Snouck Horgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, terj. Ng Singarimbun, cet.I, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985

Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2003

Yusuf al-Qardhawi Al-Asyi, *Status Aceh dalam NKRI Pasca MoU Helsinki Menurut Hukum Internasional*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2014

<http://kbbi.web.id/perspektif>, diakses 16 Maret 2015

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php/id=10896> diakses pada 4 Juli 2015.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php/id=10896> diakses pada 4 Juli 2015.

[www.asnfl.org/Siaran Pers 11 November 2012](http://www.asnfl.org/Siaran_Pers_11_November_2012), diakses 6 Mei 2015

www.kba13.com/2015/04/misteri-gelar-wali-nanggroe-.html/m=1 diakses 6 Mei 2015

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. SK Bimbingan**
- 2. Kilas Singkat Perjalanan Hasan Tiro**
- 3. Naskah Pelantikan Wali Nanggroe**
- 4. Lampiran I Daftar Informan**
- 5. Lampiran II Pedoman Wawancara**
- 6. Daftar Riwayat Hidup**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas

Nama :NURMALIA
Tempat/ tanggalahir :Uteun Geulinggang,2November1992
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status :Lajang
AlamatSekarang :Lamglumpang
Pekerjaan/Nim :Mahasiswi/ 511102492

2. Nama Orang Tua

a) Ayah :Syarifuddin
Pekerjaan :Pensiunan
Agama :Islam
Alamat :Uteun Geulinggang, Aceh Utara

b) Ibu :Nurhayati
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat :Uteun Geulinggang, Aceh Utara

3. Pendidikan

a) MIN : SD 05 Dewantara : 2005
b) MTSN :MTsS Ulumuddin : 2008
c) MAN : Man Model B. Aceh : 2011
d) PerguruanTinggi :FakultasAdabdanHumaniora UIN Ar- Raniry
Aceh : 2016

LAMPIRAN

Kilas Singkat Perjalanan Hasan Tiro

Tahun	Umur	Aktivitas
1945	20 tahun	Pengurus BPI di Lammeulou
1948	23 tahun	Mendirikan PII cabang Aceh, menerbitkan buku Perang Atjeh 1873-1927
1949	24 tahun	Memandu anggota KTN PBB ke Banda Aceh, dan Mr Sjafruddin Prawiranegara membawa Hasan Tiro ke Kutaradja
1950	25 tahun	Kuliah di Universitas Columbia New York Amerika, Bekerja di Markas PBB
1954	29 tahun	Mengirim surat protes kepada perdana menteri Mr. Ali Sastroamidjojo
1954	29 tahun	Perdana menteri Mr. Ali Sastroamidjojo mencabut papsor diplomatik Hasan Tiro, dan diangkat sebagai Duta Besar DI/TII di PBB oleh Tgk Muhammad Daud Beureu-eh
1954	29 tahun	Harian Sin Pon memuat berita Moh Tiro akan menuduh RI di PBB
1955	30 tahun	Mengirim senjata ke DI/TI di Aceh
1955	30 tahun	Mengajak Belasan negara untuk memboikot KAA
1955	30 tahun	Bertemu Abdul Kahhar Muzakkar
1958	33 tahun	Menerbitkan buku Demokrasi untuk Indonesia
1958	33 tahun	Bertemu dengan Perdana Menteri DI/TI Hasan Ali di Jenewa
1959	34 tahun	Pulang secara Rahasia dari Amerika melalui Malaysia ke Aceh
1960	35 tahun	Menyelinapkan Selebaran di kamar hotel tempat Presiden Soekarno di New York
1960	35 tahun	Bolak Bali Malaysia-Singapura-Maerika dan ke berbagai negara
1965	40 tahun	Menggagaskan Aceh Merdeka
1968	43 tahun	Menerbitkan buku Masa Depan Dunia Melayu
1968	43 tahun	Menerbitkan buku Atjeh Bak Mata Donja
1971	46 tahun	Bertemu dengan Tgk Muhammad Daud Berue-eh di Amerika Serikat

1971	46 tahun	Bertemu dengan Zainoel Abidin di Tiro di Amerika Serikat
1972	47 tahun	Raja Arab Saudi Faisal mengangkat Hasan Tiro sebagai penasihat Agung Muktamar Islam se-dunia
1973	48 tahun	Dubes RI untuk Amerika memberi visa kepada Hasan Tiro
1975	59 tahun	University of Plano di Amerika Serikat menyematkan gelar doktor di bidang hukum LL.D
1976	51 tahun	Mendeklarasikan ulang kemerdekaan Aceh
1976	51 tahun	Menerima dr.Muchtar Yahya Hasbi, dr.Zaini Abdullah dan dr. Zubir Mahmud di Pidie
1977-1979	52 tahun	Menulis Price of Freedom : The Unfinished Diary of Tgk Hasan Tiro
1977	52 tahun	Tgk Muhammad Daud Beureu-eh mengusulkan Hasan Tiro sebagai Ketua Aceh Merdeka dan Wali Negara Aceh
1977	52 tahun	Kuliah perdana di University of Aceh di Pidie
1978	53 tahun	Merayakan Hari Buruh Dunia dengan ceramah di Pidie
1979	54 tahun	Mengeluarkan Dekrit selama Hasan Tiro di luar negeri, kabinet Aceh Merdeka dipimpin dewan menteri
1980	55 tahun	Berkampanye mencari dukungan Internasional di Luar negeri
1981	51 tahun	Menerbitkan Buku The Price of Freedom: The Unfinished Diary of Tgk Hasan Tiro
1982	52 tahun	Mendapat suaka politik Swedia
1982	52 tahun	Mengirim surat kepada panglima Darat Aceh Merdeka Daud Paneuk untuk keluar negeri
1983	53 tahun	Bersama Anggota GAM berunjuk rasa di depan KBRI StockHolm
1986	56 tahun	Memimpin latihan tentara Aceh Merdeka di Libya
1988	58 tahun	Dipercaya Muammar Kadafi untuk menjadi pemimpin politik Matsabah Alamiah
1990	60 tahun	GAM resmi menjadi anggota UNPO
1991	61 tahun	Menyampaikan permasalahan Aceh di Jenewa
1992	62 tahun	Meminta PBB untuk mengadakan referendum Aceh di Jenewa
1994	68 tahun	Berpidato di Palaes Des Nations, Jenewa dengan judul The Case and The Cause of Aceh-Sumatera

1999	73 tahun	Mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Koffi Anan
2000	74 tahun	Bertemu Dubes RI untuk Jenewa Hasan Wirajuda yang difasilitasi HDC
2002	78 tahun	Melantik Malik Mahmud al-Haytar sebagai Perdana Menteri dan dr. Zaini Abdullah sebagai Menteri Luar Negeri
2003	79 tahun	Pemerintah Swedia memanggil Hasan Tiro
2008	84 tahun	Bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di Jakarta
2008	84 tahun	Bertemu dengan Ketua MPR AM Fatwa dan anggota DPR RI dan DPD asal Aceh
2010	86 tahun	Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar memberikan status WNI kepada Hasan Tiro
2010	86 tahun	Menkopolkam Djoko Suyanto membesuk dan menyerahkan surat keputusan menteri hukum dan ham tentang kewarganegaraan RI kepada Hasan Tiro

Sumber : Hasan M di Tiro, Aceh di Mata Dunia, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2013

Lampiran

DAFTAR INFORMAN

Nama : Ramli A Dally

Umur : 76 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pensiunan PNS

Alamat : Pungee

Keterangan : merupakan seorang sejarawan yang selama 20 tahun lebih aktif di Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh

Nama : Rusdi Sufi

Umur : 72 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Dosen

Alamat : Pagar Air

Keterangan : seorang sejarawan

Nama : Samsudin Jalil (Ayah Panton)

Umur : 60 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Pensiunan

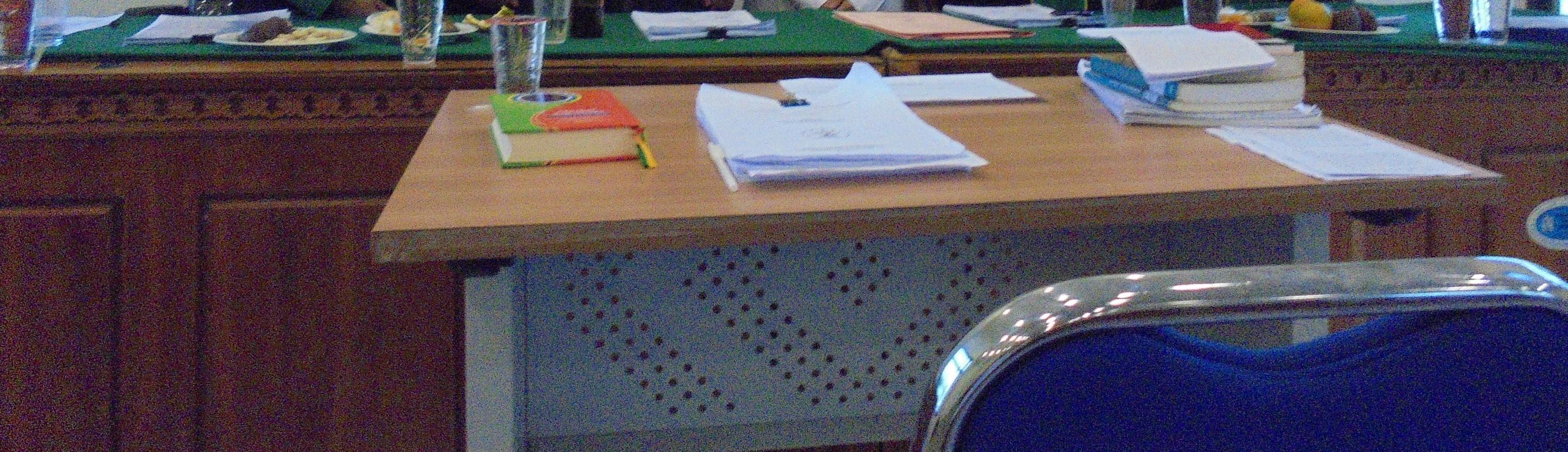
Alamat : Panton

Keterangan : seorang sejarawan dan budayawan

Lampiran

Pedoman Wawancara

1. Menurut bapak bagaimana sejarah terbentuknya wali nanggroe ?
2. Siapa saja yang pernah menduduki jabatan wali nanggroe ?
3. Sepengetahuan bapak apakah pada saat Aceh masih berbentuk kerajaan wali nanggroe sudah ada ?
4. Apakah benar keluarga di Tiro pernah menjadi wali nanggroe ?
5. Bagaimana silsilah wali nanggroe hingga saat ini ?
6. Apa alasan wali nanggroe dibentuk kembali ?
7. Bagaimana kedudukan wali nanggroe saat ini ?
8. Apa peran wali nanggroe saat ini ?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَاللَّهُ بِاللَّهِ تَالِهٌ أَقْسِمُ بِاللَّهِ قَابِضًا بِيَدِي هَذَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَنْ أَجْعَلَ
نَفْسِي وَ دَمِي وَ مَالِي فِدَاءً لِلْأَشْيَاءِ فِي الدَّوْلَةِ إِتْحَادِ جُمْهُورِيَّةِ
إِنْدُونِسِيَا

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

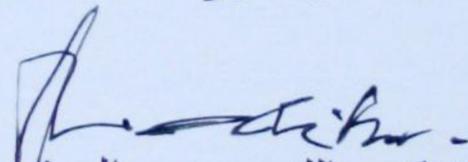
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾

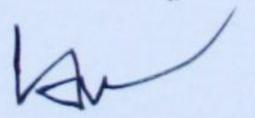
﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

آجيه : ١١ صفر ١٤٣٥ هجيرة

ثنين ١٦ ديسمبر ٢٠١٣ مسيحي

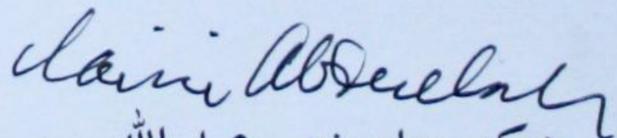

تغكو مالك محمود الحياتر
ولي نغرو

سكسي


دكتور اندوس حاج حسيبي عبد الله م.س

كتوا ديوان فرواكلن رعية آجيه

سكسي


دوكتو ر حاج زيني عبد الله

كوبرنور آجيه

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah

Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.

Demi Allah, demi Allah, demi Allah.

Saya bersumpah dengan nama Allah seraya Al-Quran yang mulia di tangan saya.

Bahwa akan saya serahkan nyawa, darah, dan harta saya untuk Aceh

dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan pemimpinmu.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu.

Bagi orang yang melanggar janji yang telah dia janjikannya dengan Allah

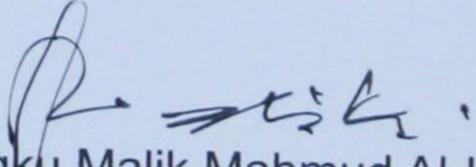
maka akan dilaknati oleh Allah dan dimasukkannya ke dalam api neraka.

Penuhilah janjimu, sebab janjimu akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat.

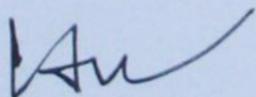
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman

Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya.

Aceh : Senin 11 Shafar 1435 H
16 Desember 2013 M

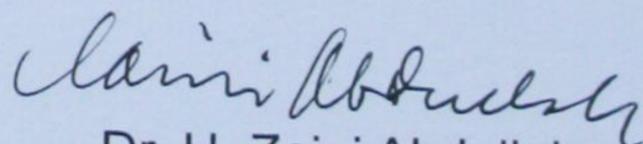

Tengku Malik Mahmud Al-Haythar
Wali Nanggroe

Saksi



Drs. H. Hasbi Abdullah, MS
Ketua DPR Aceh

Saksi



Dr. H. Zaini Abdullah
Gubernur Aceh